

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian . Di dalamnya termasuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 .

Dokumen Rencana Strategis ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dalam kurun waktu lima tahun ke depan, akan menentukan langkah kebijakan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua pihak yang atas dukungan dan kerjasamanya Rencana Strategis ini dapat terselesaikan. Harapan kami apa yang telah disusun dapat bermanfaat bagi pembangunan pertanian di Provinsi Maluku.

Ambon, September 2019

Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Maluku



Ir. DIANA PADANG MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19610319 198603 2 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	li
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II. GAMBARAN UMUM	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian	6
2.2 Sumberdaya Dinas Pertanian	21
2.3 Kinerja Pembangunan Pertanian 2014 - 2018	29
2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perta	35
2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Ling Hidup Strategis (KLHS)	36
2.6 Peluang Pembangunan Pertanian di Provinsi Maluku	44
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelay	46
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Kabupaten/Kota	54
3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berd Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Pengha dan Pendorongnya	55
3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta F Penghambat dan Pendorongnya	
3.6 Gugus Pulau Berdasarkan Potensi Pengembangan	56
3.7 Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya Pertanian	58
3.8 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Pend	60

	dan Penghambat	
3.9	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Hasil Analisis KLHS Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat	61 62
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran	67
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024	70
BAB VI.	PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN	
6.1	Rencana Program	76
6.2	Rencana Kegiatan	76
BAB VII.	PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2007

DAFTAR TABEL

Tabel	2.3	Data Aset / Modal dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2018	23
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2019	30
Tabel	2.5	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Provinsi terhadap Sasaran Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra K/L	36
Tabel	2.4	Nilai Tukar Petani	33
Tabel	2.5	Produksi Komoditas Tanaman Pangan	36
Tabel	2.6	Gugus Pulau Berdasarkan Potensi Pengembangan	38
Tabel	2.7	Telaahan Rencana Struktur Ruang Wilayah (RTRW)	41
Tabel	2.8	Telaahan Rencana Pola Ruang Wilayah (RTRW)	42
Tabel	2.9	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Telaahan KLHS beserta factor Penghambat Dan Pendorong	43
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi	46
Tabel	3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Provinsi Maluku Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	51
Tabel	3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya	55
Tabel	3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Sasaran Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya	56
Tabel	3.6	Gugus Pulau Berdasarkan Potensi Pengembangan	58
Tabel	3.7	Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya Pertanian	60
Tabel	3.8	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya	61
Tabel	3.9	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Hasil Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya	62
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Provinsi Maluku	68

Tabel	5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024	70
-------	-----	---	----

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN UMUM	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian	5
2.2. Sumberdaya Dinas Pertanian	18
2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian Provinsi Maluku	25
2.4. Capaian Anggaran Pembangunan Pertanian	32
2.5. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian	44
BAB III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	45
3.2. Telaahan Visi dan Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	47
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Kabupaten/Kota	50
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan kajian KLHS	51
3.5. Penentuan Isu-isu strategis	58
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Visi dan Misi	63
4.2. Tujuan dan Sasaran	64
B AB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIAKTIF	
5.1. Rencana Program	71
5.2. Rencana Kegiatan	72
5.3. Indikator Kinerja	75
5.4. Kelompok Sasaran	77
5.5. Rencana Pendanaan Indikatif	79
B AB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	92

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Maluku	7
Gambar 2.2	Kontribusi PFRB Sektor Pertanian Periode Tahun 2008 - 2013	26

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas pertanian Provinsi Maluku menurut Pangkat dan Golongan	19
Tabel 2.2. Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Pertanian Provinsi Maluku menurut Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.3. Data Aset/ Modal Dinas Pertanian Provinsi Maluku	20
Tabel 2.4. Nilai Tukar Petani	25
Tabel 2.5. Produksi Komoditas Tanaman Pangan	28
Tabel 2.6. Produksi Komoditas Hortikultura	28
Tabel 2.7. Produksi Komoditas Perkebunan	29
Tabel 2.8. Populasi Ternak	29
Tabel 2.9. Produksi Daging dan Telur	29
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2008 - 2012	31
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas	33
Tabel 2.12 Komparasi capaian sasaran Renstra Provinsi Terhadap Sasaran Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra K/L	35
Tabel 2.13 Gugs Pulau Berdasarkan Potensi Pengembangan	38
Tabel 2.14 Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya Pertanian	39
Tabel 2.15 Telaahan Rencana Struktur Ruang Wilayah (RTRW)	41
Tabel 2.16 Telaahan Rencana Pola Ruang Wilayah (RTRW)	42
Tabel 2.17 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku berdasarkan Telaahan KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong	48
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi	46
Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis	47
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Provinsi Maluku Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	49
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya	50
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya	51
Tabel 3.6. Gugus Pulau Berdasarkan Potensi Pengembangan	53
Tabel 3.7. Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya Pertanian	55
Tabel 3.8. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	56
Tabel 3.9. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Hasil Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	57
Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan SKPD	67
Tabel 4.2. Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2014-2019	69
Tabel 5.1. Sasaran Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian	78

Tabel 5.2.	Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif	80
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	93

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pertanian memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui sinergitas faktor utama yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan pertanian.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun 2019-2024 merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Provinsi Maluku yang telah bersinergi dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2019-2024, serta merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan jangka Panjang Provinsi Maluku Tahun 2005-2025. Rencana Strategis yang tersusun memuat Tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5(lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 melalui serangkaian proses yaitu persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan dan penetapan. Proses penyusunan selain bepatokan pada RPJMD juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta komitmen nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs=*sustainable development goals*) yang telah termuat dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Pertanian. Sebagai dokumen yang akan menjadi acuan dan bersifat operasional, tujuan dan sasaran pembangunan telah memperhatikan Rencana Strategis Dinas Lingkup Pertanian di Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2016 Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2019-2024 juga telah memuat rencana pembangunan pada sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Hortikultura, serta bidang pembangunan sumberdaya manusia pertanian yang berperan dalam kemajuan sektor pertanian secara umum.

Diharapkan dokumen ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas program dan kegiatan tahunan Dinas maupun sebagai

sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan di sektor pertanian

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- i. Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur tugas dan fungsi Dinas urusan Pangan dan Dinas urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 02 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku tahun 2005 - 2025 ;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku tahun 2013 - 2033;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
- l. Peraturan daerah No Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024
- m. Peraturan Gubernur Maluku nomor 26 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Maluku.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 adalah menyediakan dokumen pelaksanaan pembangunan urusan pilihan pertanian sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 –2019 yaitu :

1. Merupakan acuan resmi bagi seluruh aparaturnya Dinas lingkup Pertanian dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan pertanian
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian selama lima tahun.
3. Menjadi sarana pengendalian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Maluku disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah . Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Ulasan tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah periode sebelumnya, capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGISS

Memaparkan tentang permasalahan pelayanan Dinas Pertanian berdasarkan tugas dan fungsi, berdasarkan visi dan misi kepala daerah, berdasarkan telaah Renstra Provinsi dan Kementerian berdasarkan telaah RTRW dan KLHS. Selain itu juga memaparkan isu Strategiss yang berkembang dalam dinamika internasional, nasional, regional, dan lain-lain, dan menyebutkan isu-isu Strategiss yang ditangani dalam periode Renstra tahun 2019-2024.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjabarkan tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan RPJMD 2019- 2024. Termasuk penetapan indikator sasaran dalam mengkonkretkan gerak pembangunan yang akan dilaksanakan.

BAB V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan Strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Maluku

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Maluku adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah .

Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pertanian Provinsi Maluku adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di Bidang Pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 44, Dinas Pertanian menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan program di bidang pertanian sesuai Rencana strategis Daerah / RPJMD;
- b. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pertanian;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan teknis di bidang pertanian;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan ;
- h. Pelaksanaan kebijakan gubernur yang diberikan sesuai fungsi Dinas
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Pertanian Provinsi Maluku terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas,
- 2) Sekretariat
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- 3) Bidang Tanaman Pangan
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - Seksi Produksi; dan

- Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- 4) Bidang Hortikultura
- Seksi Perbenihan dan Perlindungan;

- Seksi Produksi; dan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- 5) Bidang Perkebunan
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - Seksi Produksi; dan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - 6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - 7) Bidang Penyuluhan
 - Seksi Kelembagaan;
 - Seksi Ketenagaan; dan
 - Seksi Metode dan Informasi.
 - 8) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
 - 9) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007, tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris, Bidang dan Sub Bagian / Seksi pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- 1) Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanian :(Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian).
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanian
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanian
 - d. Pembinaan Teknis di Bidang Pertanian.
 - e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan Pelayanan Teknis Dan Administrasi Kepada Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pertanian.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran di Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- c. Penataan Organisasi dan Tatalaksana.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- 1) Sub bagian Kepegawaian dan umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris Dinas dalam Melakukan Urusan Kepegawaian, Tata Usaha, Rumah Tangga, Kerjasama, Kehumasan dan Protokol Serta Ketatalaksanaan.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Melakukan Penyusunan Rencana dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Melakukan Urusan Rencana Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai.
 - c. Melakukan Urusan Mutasi, Tanda Jasa, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian Dan Pensiun Pegawai.
 - d. Melakukan Urusan Tata Usaha Kepegawaian, Disiplin Pegawai Dan Evaluasi Kinerja Pegawai.
 - e. Melakukan Urusan Tata Usaha dan Kearsipan.
 - f. Melakukan Urusan Rumah Tangga, Keamanan Dan Kebersihan.
 - g. Melakukan Urusan Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - h. Melakukan Evaluasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 - i. Melakukan telaahan dan Penyiapan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
 - j. Melakukan Penyusunan Laporan dan Pendokumentasian kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam Menyiapkan Bahan Penyusunan dan Rencana Program dan Anggaran serta Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pertanian.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Melakukan Penyusunan Rencana dan Anggaran Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Melakukan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program di Bidang Pertanian.
- c. Melakukan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran di Bidang Pertanian.
- d. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahunan di Bidang Pertanian.
- e. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Satuan Biaya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan Revisi Anggaran.
- f. Melakukan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data dan Statistik di Bidang Pertanian.
- g. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pertanian.
- h. Melakukan Penyusunan Pelaporan Kinerja di Bidang Pertanian.
- i. Melakukan Penyusunan Pelaporan dan Pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.3. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam menyiapkan Urusan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Melakukan Penyusunan Rencana dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset.
 - b. Melakukan Urusan Akutansi, dan Verifikasi Keuangan.
 - c. Melakukan Urusan Perbendaharaan, Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - d. Melakukan Urusan Gaji Pegawai.
 - e. Melakukan Administrasi Keuangan.
 - f. Melakukan Penyiapan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Dokumen Keuangan.
 - g. Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan.
 - h. Melakukan Penyiapan Bahan Pemantauan tidak lanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
 - i. Melakukan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
 - j. Melakukan Penyiapan Bahan Penatausahaan dan Inventarisasi Barang.
 - k. Melakukan Penyiapan Bahan Administrasi Pengadaan, Penyaluran, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

- l. Melakukan Penyiapan Penyusunan Laporan dan Administrasi Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- m. Melakukan Penyusunan Laporan dan Pendokumentasian Kegiatan Sub bagian Keuangan dan Aset.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Bidang Tanaman Pangan

- 1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan, dan Pemberian Bimbingan Teknis, serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tanaman Pangan
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan Perbenihan, Produksi, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Bidang Tanaman Pangan.
 - b. Perencanaan Kebutuhan dan Penyediaan Benih di Bidang Tanaman Pangan.
 - c. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih di Bidang Tanaman Pangan.
 - d. Pemberian Bimbingan Penerapan Peningkatan Produksi di Bidang Tanaman Pangan.
 - e. Pengendalian dan Penanggulangan Hama Penyakit, Penanggulangan Bencana Alam, dan Dampak Perubahan Iklim di Bidang Tanaman Pangan.
 - f. Pemberian Bimbingan Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Bidang Tanaman Pangan.
 - g. Pemberian Izin Usaha/Rekomendasi Teknis di Bidang Tanaman Pangan.
 - h. Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tanaman Pangan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C.1. Seksi Produksi

- 1) Seksi Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Bimbingan Teknis dan Pemantauan Serta Evaluasi di Bidang Produksi Tanaman Pangan.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan.
 - b. Melakukan penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan, Peningkatan Produksi di Bidang Tanaman Pangan.
 - c. Melakukan Penyiapan Bahan Kebijakan Produksi di Bidang Tanaman Pangan.
 - d. Melakukan Menyiapkan Bahan Rencana Taman dan Produksi di Bidang Tanaman Pangan.

- e. Melakukan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Produksi di Bidang Tanaman Pangan.
- f. Melakukan Bimbingan Penerapan Teknologi Budidaya di Bidang Tanaman Pangan.
- g. Melakukan Penyusunan Pelaporan Dan Pendokumentasian Kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C.2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

- 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian Bimbingan Teknis dan Pemantauan Serta Evaluasi di Bidang Perbenihan dan Perlindungan
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan.
 - b. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan Perbenihan dan Perlindungan di Bidang Tanaman Pangan.
 - c. Melakukan Penyiapan Bahan Penyediaan dan Pengawasan Peredaran Benih di Bidang Tanaman Pangan.
 - d. Melakukan Penyiapan bahan Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih di Bidang Tanaman Pangan.
 - e. Melakukan Penyiapan Bahan Sertifikasi Benih dan Pengendalian Sumber Benih di Bidang Tanaman Pangan.
 - f. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan Benih dan Pengembangan Varietas Unggul.
 - g. Melakukan Penyiapan Bahan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih yang beredar.
 - h. Melakukan Penyiapan Bahan Bimbingan Produksi Benih dan Kelembagaan Benih.
 - i. Melakukan Penyiapan Bahan Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
 - j. Melakukan Penyiapan Bahan Pengamatan OPT.
 - k. Melakukan menyiapkan bahan Pengendalian dan Pemantauan OPT, Bimbingan Operasional Pengamatan dan Peramalan OPT.
 - l. Melakukan Pengelolaan Data OPT.
 - m. Melakukan Penyiapan Bahan Bimbingan Kelembagaan OPT.
 - n. Melaksanakan Penyiapan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu.
 - o. Melakukan Penyiapan Bahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim.
 - p. Melakukan Penyiapan Bahan Penanggulangan Bencana Alam.

- q. Melakukan Penyiapan Bahan Bimbingan Teknis Perbenihan dan Perlindungan di Bidang Tanaman Pangan.
- r. Melakukan Penyusunan Pelaporan dan Pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan.
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

- 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran tugas Membantu Kepala Bidang Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Pemberian Bimbingan Teknis Serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pengolahan dan Pemasaran.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - b. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan kebijakan Pengolahan Hasil di Bidang Tanaman Pangan.
 - c. Melakukan Penyiapan Bahan Bimbingan dan Pengembangan Unit Pengolahan Hasil di Bidang Tanaman Pangan.
 - d. Melakukan Penyiapan Kebutuhan Alat Pengolahan Hasil di Bidang Tanaman Pangan.
 - e. Melakukan Penyiapan Bahan Penerapan cara Produksi Pangan olahan yang baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di Bidang Tanaman Pangan.
 - f. Melakukan Pelayanan dan Pengembangan Informasi Pasar.
 - g. Melakukan Fasilitasi Promosi Produk di Bidang Tanaman Pangan.
 - h. Melakukan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Bidang Tanaman Pangan.
 - i. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Bidang Tanaman Pangan.
 - j. Melakukan Penyusunan Pelaporan dan Pendokumentasian Kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Bidang Hortikultura

- 1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;

- c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D.1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

- 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
 - c. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang hortikultura;
 - d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang hortikultura;
 - e. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang hortikultura;
 - f. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
 - k. Melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
 - l. Melakukan pengelolaan data OPT;
 - m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
 - n. Melakukan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
 - o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;

- q. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- r. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D.2. Seksi Produksi

- 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi hortikultura.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang hortikultura;
 - c. Menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
 - f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

- 1) Seksi Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
 - f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

- g. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Bidang Perkebunan

- 1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
 - i. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E.1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

- 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan perkebunan mempunyai tugas Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan perlindungan perkebunan.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
- d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
- e. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT;
- m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E.2. Seksi Produksi

- 1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
 - d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;

- f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

- 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan.
 - c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
 - f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 1) Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Melaksanakan Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan, dan Pemberian Bimbingan Teknis, Serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan Benih/Bibit, Produksi, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perlindungan serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Bidang Peternakan.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan.

- c. Perencanaan Kebutuhan dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak, Pakan Ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak.
- d. Pemberian Bimbingan Penerapan Peningkatan Produksi Ternak.
- e. Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Pengawasan Peredaran dan Penggunaan serta Sertifikasi Benih/Bibit Ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan.
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan.
- h. Pelaksanaan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- i. Pemberian Izin/Rekomendasi di Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- j. Pemberian Bimbingan Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Bidang Peternakan.
- k. Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F.1. Seksi Perbibitan dan Produksi

- 1) Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan membantu Kepala Bidang dalam Melakukan penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Pemberian Bimbingan Teknis serta Pemantauan dan Evaluasi Benih/Bibit, Pakan, dan Produksi di Bidang Peternakan.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan Bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi.
 - b. Melakukan penyiapan Bahan Penyusunan kebijakan Benih/Bibit, Pakan, dan Produksi di Bidang Peternakan.
 - c. Melakukan Penyiapan bahan Penyediaan dan Peredaran Pakan, Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak.
 - d. Melakukan penyiapan bahan Pengendalian Penyediaan dan Peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT).
 - e. Melakukan penyiapan Bahan Pengawasan Produksi, Mutu, Pakan, Benih/Bibit HPT.
 - f. Melakukan penyiapan bahan Pengujian Binih/Bibit HPT.
 - g. Melakukan penyiapan bahan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan melalui Jaminan Kemurnian dan Kelestarian.
 - h. Melakukan pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Ternak.
 - i. Melakukan penyiapan bahan Pemberdayaan Kelompok Peternak.
 - j. Melakukan penyusunan Pelaporan dan Pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, Pakan, dan Produksi di Bidang Peternakan.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F.2. Seksi Kesehatan Hewan

- 1) Seksi Kesehatan Hewan membantu Kepala Bidang dalam Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Pemberian Bimbingan Teknis serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Kesehatan Hewan.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Seksi Kesehatan Hewan.
 - b. Melakukan penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Kesehatan Hewan.
 - c. Melakukan penyiapan bahan Pengawasan dan Mutu Obat Hewan Tingkat Distributor.
 - d. Melakukan penyiapan bahan Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
 - e. Melakukan penyiapan bahan Penetapan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan dan Penerbitan Keterangan Kesehatan Hewan.
 - f. Melakukan Fasilitasi Unit Pelayanan Kesehatan Hewan.
 - g. Melakukan penyiapan bahan Penanggulangan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular.
 - h. Melakukan penyiapan bahan Pengawasan Peredaran dan Penerapan Mutu Obat Hewan.
 - i. Melakukan penyiapan bahan Penerbitan Izin/ Rekomendasi Usaha Distributor Obat Hewan.
 - j. Melakukan Penyusunan Pelaporan dan Pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F.3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

- 1) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Pemberian Bimbingan Teknis serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - b. Melakukan penyiapan bahan Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Bidang Peternakan.
 - c. Melakukan penyiapan bahan Penilaian Penerapan Penanganan Limbah Dampak, Hygiene dan Sanitasi Usaha Produk Hewan.
 - d. Melakukan Pemberian Fasilitas Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan Skala Kecil.
 - e. Melakukan penyiapan bahan Rekomendasi Teknis Hasil Penilaian Dokumen Aplikasi Pengeluaran Dan/ Atau Pemasukan Produk Hewan.
 - f. Melakukan Analisis Resiko Pengeluaran dan Pemasukan Produk Hewan.
 - g. Melakukan Penyiapan Sertifikasi Veteriner Pengeluaran Produk Hewan.

- h. Melakukan penyiapan bahan Pencegahan Penularan Zoonosis.
- i. Melakukan penyiapan bahan Bimbingan Rumah Potong Dan Pematangan Hewan Qurban.
- j. Melakukan penyiapan bahan Bimbingan dan Pengembangan Unit Pengolahan Hasil di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- k. Melakukan penyiapan bahan Penyusunan Kebutuhan Alat Pengolahan Hasil di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- l. Melakukan penyiapan bahan Penerapan cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- m. Melakukan Pelayanan dan Pengembangan Informasi Pasar di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- n. Melakukan Fasilitasi Promosi Produk di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- o. Melakukan penyiapan bahan pemberian Bimbingan Teknis Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Bidang Peternakan.
- p. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Bidang Peternakan.
- q. Melakukan Penyusunan Pelaporan dan Pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Bidang Penyuluhan

- 1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan dan program di bidang penyuluhan pertanian;
 - b. Bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian;
 - c. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - e. Pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
 - f. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G.1. Seksi Kelembagaan

- 1) Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c) Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d) Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e) Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f) Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g) Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
 - h) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G.2. Seksi Ketenagaan

- 1) Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
 - e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G.3. Seksi Metode dan Informasi

- 1) Membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode, Dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
 - b) melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c) melakukan penyusunan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
 - d) melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
 - e) melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
 - f) melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
 - g) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode, Dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. Sumberdaya Dinas Pertanian Provinsi Maluku

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan pertanian pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang cukup secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pertanian sampai dengan Desember 2018 seperti Tabel 2.1 menunjukkan jumlah aparatur pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku termasuk di dalamnya Unit Pelayanan Teknis sebanyak 365 orang. Dimana aparatur pada Dinas Pertanian adalah yang terbanyak dengan 200 orang aparatur (54,8 %). Sedangkan pangkat dan golongan yang terbanyak adalah golongan III (263 orang atau 72,05 persen) . Adapun tingkat pendidikan yang terbanyak adalah tingkat Sarjana dengan komposisi 86 orang S1, 28 orang S2 dan 1 orang S3. Berdasarkan jumlah dan kepangkatan serta kualifikasi pendidikan maka Dinas Pertanian Provinsi Maluku siap untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembangunan pertanian yang direncanakan dalam Rencana Strategi.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Provinsi Maluku - Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Unit Pelayanan Terknis Daerah	Jumlah Pegawai (Org)				Jumlah (Org)
		Gol.IV	Gol.III	Gol.II	Gol.I	
1	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	16	146	38		200
2	BP3 Provinsi Maluku	1	40	11		52
3	BPSBBPP	3	24	6		33
4	Balai Diklat Pertanian Provinsi Maluku	3	16	10	1	30
5	Sekolah Pembangunan Pertanian - Passo	3	37	10		50
	Jumlah Personil (Org)	26	263	75		365

Tabel 2.2. Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Pertanian Provinsi Maluku Menurut Tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Golongan I				Golonga II				Golonga III				Golonga IV				Jlh
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
SD																	
SMP																	
SMA					3	2	12	21		48							86
D3											1						1
D2																	
S1									12	10	24	34	4				84
S2											7	9	9	3			28
S3													1				1
Jumlah					3	2	12	21	12	58	32	43	14	3			200

2.2.2. Aset / Modal

Selain perlunya sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas diperlukan juga dukungan sarana prasarana Pertanian yang mencukupi. Adapun data Aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Provinsi Maluku mencapai Rp. 73.391.687.032,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Data Aset / Modal Dinas Pertanian Provinsi Maluku (tahun 2018)

No	Jenis Barang	Volume	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah Dinas	8 bidang	11.064.672.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	10.924	22.263.016.625,00	
	Alat-alat besar	17	365.530.000,00	
	Alat-alat angkutan	352	8.295.288.000,00	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	38	821.865.152,27	
	Alat Pertanian	402	3.903.391.400,00	
	Alat Kantor dan Rumah tangga	9.877	7.488.715.685,63	
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	73	617.008.000,00	
	Alat-Alat Kedokteran	13	26.260.000,00	
	Alat-Alat Laboratorium	152	744.958.387,10	
	Alat-alat persenjataan/ keamanan	0,00	0,00	
3	Gedung dan Bangunan		54.880.738.032,00	
	Bangunan Gedung		54.436.928.032,00	
	Monumen		443.810.000,00	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		5.366.703.600,00	
	Jalan dan jembatan		1.783.153.000,00	
	Bangunan Air / Irigasi		2.380.950.000,00	
	Instalasi		220.180.000,00	
	Jaringan		982.420.600,00	
5	Aset Tetap Lainnya	1.598	2.079.574.000,00	
	Buku dan Perpustakaan	4	388.600.000,00	
	Barang Bercorak Kebudayaan	-	0,00	
	Hewan, Ternak dan Tanaman	1.594	1.690.974.000,00	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	0,00	

2.2.3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas pertanian dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh sejumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) maupun Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kewenangan pusat (Kementerian Pertanian). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta Unit Operasional yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

2.2.3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas pertanian dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh sejumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) maupun Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kewenangan pusat (Kementerian Pertanian). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta Unit Operasional yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

A. UPTD BP3M

UPTD BP3M (Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Maluku) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelayanan Perlindungan Tanaman dan Ternak. Organisasi BP3M terdiri dari :

- Kepala UPTD
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Proteksi Pertanian
- Kepala Seksi proteksi Peternakan
- Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan fungsinya, UPTD ini ditunjang dengan kelembagaan yang cukup memadai, diantaranya :

- 1) Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit sebanyak 4 (empat) unit yang terletak di Passo (kota Ambon), Mako (Kabupaten Buru), Kobisonta (Kabupaten Maluku Tengah), Kairatu (Kabupaten Seram Bagian Barat).
- 2) Brigade Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 5 (lima) unit yang terletak di Passo (Kota Ambon), Mako (Kabupaten Buru), Kairatu (Kabupaten Seram Bagian Barat), Kobisonta (Kabupaten Maluku Tengah), Aki Jaya (Kabupaten Seram Bagian Timur).
- 3) Pos Pengembangan Agens Hayati sebanyak 8 (delapan) unit yang terletak di Dusun Air Ali Desa Rumahtiga dan Desa Passo (Kota Ambon), Seti, Kobisonta (Kabupaten Maluku Tengah), Waimital, Waihattu (Kabupaten Seram Bagian Barat), Waikasar, Savana Jaya (Kabupaten Buru).
- 4) Regu Pengendalian Hama sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) regu yang tersebar di seluruh sentra produksi.
- 5) Klinik Tanaman sebanyak 1 (satu) unit yang terdapat di Desa Holo Kecamatan Amahai (Kabupaten Maluku Tengah)

B. UPTD BPSBBPP

Balai Pengawasan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan (BPSBBPP) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Maluku bertugas membantu Kepala Dinas dalam memelihara kemurnian dan mutu dari varietas unggul serta menyediakan secara kontinyu kepada petani.

Struktur UPTD BPSB terdiri dari :

- Kepala UPTD
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian
- Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Bibit Peternakan

Dalam melaksanakan fungsinya, UPDT ini ditunjang dengan kelembagaan antara lain:

1. Laboratorium Pengujian Benih (basah dan kering) 1 unit
2. Bangunan Kantor 1 unit
3. Screen House 1 Unit

C. UPTD Balai Diklat Pertanian (BDP)

Balai Diklat Pertanian (BDP) bertugas menyelenggarakan Diklat bagi aparatur dan masyarakat pertanian lainnya berdasarkan kompetensi kerja, meningkatkan mutu penyelenggaraan Diklat, meningkatkan kualitas SDM Balai , meningkatkan kerjasama, kemitraan dan partisipasi swasta, petani dan intansi lainnya dalam penyelenggaraan Diklat dan Menyiapkan data base SDM Pertanian Provinsi Maluku. Struktur BDP terdiri dari : Kepala UPTD, Widyaiswara dan Kabag TU

Dalam Pelaksanaan tugasnya BDP ditunjang dengan kelembagaan antara lain :

1. Kelas A dengan Kapasitas 40 Orang dan Kelas B dengan Kapasitas 30 Orang dan Kelas C dengan Kapasitas 30 Orang
2. Asrama 6 Blok (90 Orang)
3. Ruang Makan (Kapasitas 90 Orang)
4. Guest House (kapasitas 7 orang) dan Mushola
5. Lahan Praktek ± 2 Ha
6. Green House

D. UPTD SPP/SPMA

SPP/SPMA mempunyai tugas menyediakan lembaga pendidikan pertanian sebagai centre of Excellent (pusat utama) penyediaan tenaga professional sebagai pelaku agribisnis di daerah Maluku. Disamping itu menghasilkan calon petani/ wirausaha dan teknisi menengah pertanian yang berjiwa pancasilais, berdisiplin

tinggi, rasa tanggung jawab serta kemampuan menerapkan karier, berkopetensi dan mengembangkan sikap secara profesional. Struktur SPMA terdiri dari :

- Kepala Sekolah
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Sarana Pra Sarana
- Seksi Pengajaran dan Pelatihan

Dalam Pelaksanaan tugasnya SPMA ditunjang dengan sarana kelembagaan antara lain :

1. Ruang Kelas 15 ruangan
2. Laboratorium 8 buah
3. Perpustakaan 1 buah

E. Unit Operasional

Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya turut didukung dengan Unit Operasional Teknis dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

E.1. Balai Benih Induk Padi Palawija Kairatu

BBI Kairatu bertugas melaksanakan sebagai tugas dinas Pertanian dibidang pengelolaan dan penangkaran dan pemasaran benih padi/palawija serta ketatausahaan. Secara organisasional BBI Kairatu terdiri dari Kepala Balai dengan ditunjang Koordinator bidang irigasi, alsintan serta Produksi dan pemasaran benih. Dalam melaksanakan Tugasnya ditunjang dengan

- Luas Areal untuk perbanyak benih padi 10 Ha
- Luas areal untuk perbanyak benih palawija 6 Ha
- Alsintan (Handtractor 4 unit, Drayer 1 unit, Seed Cleander 2 unit, RMU 1 unit, Mesin pemotong padi 1 unit, Power Thrasher 1 unit,
- Lantai jemur padi 2 unit
- Gudang benih 3 buah
- Gudang pupuk 1 buah
- Kantor 1 unit

E.2. Balai Benih Induk Hortikultura

BBI Kairatu bertugas melaksanakan sebagai tugas dinas Pertanian dibidang pengelolaan dan penangkaran dan pemasaran Hortikultura serta ketatausahaan. Organisasi BBI Hortikultura terdiri dari Kepala Balai, koordinator Administrasi, Pengawasan Produksi Benih/Bibit, Pengawasan dan Perawatan Pohon Induk, Pengawasan dan Pemasaran Hasil, Pengawasan Sarana dan Prasarana. Dalam melaksanakan fungsinya, BBI Hortikultura ditunjang dengan kelembagaan antara lain :

- Bangunan Kantor 2 Unit
- Rumah Kasa (Screen House) 5 Unit
- Rumah lindung 4 Unit
- Gudang Saprodi 2 Unit
- Gudang Peralatan 2 unit
- Gudang Benih 2 Unit
- Rumah Semai 3 Unit
- Bangunan Lab 1 Unit

E.3. Laboratorium Kesehatan Hewan Kelas B

Laboratorium Kesehatan Hewan bertugas mempertahankan Status Kesehatan Hewan di Wilayah Maluku, sehingga aman dan terkendali dari penyakit endemik dan eksotik, Menekan kemungkinan resiko penyebaran penyakit hewan menular (PHM) yang berbahaya baik bersifat zoonosis maupun ekonomis. Menjadi wahana pelatihan dan magang bagi tenaga medik dan paramedik veteriner dari kabupaten / kota. Organisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Terdiri dari Kepala Laboratorium, koordinator Administrasi dan Umum, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Epidemiologi. Dalam pelaksanaan tugasnya Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesmavet ditunjang oleh:

- Klinik (1 buah)
- Laboratorium Keswan dan Kantor (1 buah)
- Laboratorium Kesmavet dan Kantor (1 buah)

E.4. Taman Ternak Unggas Passo

Taman Ternak Unggas Passo mempunyai tugas : 1) Penyediaan kebutuhan bibit ternak unggas dan ternak kecil, 2) sebagai sarana pendidikan dan latihan untuk petugas, siswa, mahasiswa dan petani/peternak, 3) saraa penyuluhan. Organisasi Taman Ternak Passo terdiri dari : Kepala Taman Ternak Passo, koordinator bibit dan budidaya ternak, produksi, pakan ternak Dalam pelaksanaan tugasnya Taman Ternak Passo ditunjang oleh :

- Gedung Kantor 1 Unit
- Rumah Dinas 1 unit
- Tower air 3 unit
- Mesin tetas 4 unit
- Gudang 4 buah (2 Gudang Pakan dan 2 Gudang Mesin)
- Ruang Telur 1 Unit
- Ruang Penetasan 1 unit

- Kandang Unggas 3 buah (6x25), 10 buah (5x10)
- Luas Lahan Taman Ternak 1,5 Ha

E.5. Taman Ternak Sapi Makariki

Taman Ternak Sapi Makariki mempunyai tugas untuk : 1) sebagai pusat pelatihan ternak ruminansia, 2) sebagai sumber bibit sapi bermutu, 3) sebagai sumber pupuk organik, 4) Sebagai pusat informasi perbibitan ternak sapi, 5) Sebagai sumber bibit Hijauan Makanan Ternak, 6) Sebagai pusat teknologi perbibitan sapi, Organisasi Taman Ternak Sapi Makariki terdiri dari Kepala Taman, koordinator pemuliaan ternak, kesehatan hewan, hijauan makanan ternak.

Dalam pelaksanaan tugasnya Taman Ternak Sapi Makariki ditunjang oleh :

- Gedung Kantor 1 unit
- Rumah Dinas 3 unit
- Kandang 1 Unit
- Kendaraan Roda 2 1 unit
- Kendaraan Roda 3 1 unit
- Instalasi air 1 unit
- Gang way 1 unit
- Pagar kawat keliling 1900 meter
- Pos Inseminasi Buatan 2 unit
- Ternak sapi 76 ekor (jantan 7 ekor + Betina 69 ekor)
- Kebun Hijauan Makanan ternak 4 Ha
- Luas areal 110 Ha

E.6 IP2MB

Instalasi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (IP2MB) Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian dalam melakukan Sertifikasi dan Pengawasan sumber benih dan peredaran benih/bibit perkebunan. Organisasi IP2MB terdiri dari Kepala IP2MB, koordinator Pengawasan dan Sertifikasi, Pengujian Mutu Benih dan Jabatan Fungsional PBT (Pengawas Benih Tanaman) . Dalam melaksanakan fungsinya IP2MB ditunjang dengan sarana dan Pra Sarana antara lain :

- Bangunan Kantor 1 Unit
- Laboratorium Pengujian Mutu Benih 1 Unit
- Green House 1 Unit
- Kendaraan Roda 2 7 Unit

2.3 Kinerja Pembangunan Pertanian Tahun 2014 - 2018

2.3.1. Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian Tahun 2014 - 2018

Pencapaian kinerja pembangunan pertanian Dinas Pertanian Provinsi Maluku berdasarkan sasaran Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 4

Pencapaian indikator kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan , sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indeks yang diperoleh dari perbandingan harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam presentase). Merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari harga produk pertanian dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk kebutuhan biaya produksi. Dengan demikian semakin tinggi nilai Nilai Tukar Petani, secara relatif semakin kuat pula tingkat daya beli. Dari hasil perhitungan BPS Provinsi Maluku, Tahun 2018 NTP mencapai: 100,94 . Jika dibandingkan dengan target 2014 – 2018 maka NTP Maluku mencapai target. Namun Nisbah antara yang diperoleh dan dikeluarkan tetap masih menguntungkan petani.

Selama 2018, NTP Provinsi Maluku untuk subsektor Tanaman Hortikultura secara rata-rata lebih tinggi dari subsektor lainnya dengan rata-rata NTP sebesar 109,69, atau masih dengan posisi yang sama pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena perkembangan Indeks yang diterima (It) pada subsektor Tanaman Hortikultura lebih cepat meningkat dibandingkan Indeks yang dibayarkan (Ib) . Rata-rata It mencapai 145,10 sedangkan rata-rata Ib hanya Mencapai 132,28.

NTP subsektor Tanaman Pangan selama 2018 menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik dibanding 2017, dimana pada tahun 2017 secara rata-rata masih berada pada kisaran 101,32 sedangkan rata-rata tahun 2018 naik hingga padakisaran 107,32 atau sekitar 5,92 persen. NTP-P menggeser posisi NTP-Pi (subsektor Perikanan) yang sebelumnya berada pada posisi kedua selama tahun 2017. Hal ini terjadi karena perkembangan It subsector Tanaman Pangan secara rata-rata mencapai 143,20, lebih tinggi dari rata-rata perkembangan Ib yang sebesar 133,43. Rata-rata NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R) juga masih belum mencapai level di atas 100, karena rata-rata perkembangan It yang tercatat sebesar 113,95, lebih lambat dibanding rata-rata perkembangan Ib yang mencapai 132,27 akibat dari pengaruh indeks konsumsi Rumah Tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan belanja modal

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku 2014-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun ke					Realisasi Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		Menurunkan tingkat kemiskinan															
	Kontribusi Tanaman Bahan Makanan (%)	2 % /Thn		5.92	6.03	6.16	6.28	6.40	6.49	6.15	6.32	6.41	6.11	110	110	110	110	109.7
	Kontribusi Perkebunan (%)	1.5% Thn		3.35	3.40	3.45	3.50	3.56	3.39	3.22	3.41	3.47	3.49	101	95	99	99	98.17
	Kontribusi Peternakan dan Hasil-Hasilnya (%)	1 % / Thn		0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	0.59	0.58	0.55	0.54	0.54	97	95	89	86	85.63
2	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (%)	1 % / Thn	Menurunkan tingkat kemiskinan	104.5	105.0	106.0	107.0	108.0	100.51	100.8	102.59	100.89	100.94	96.2	96	97	94	93
3	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian		Menurunkan tingkat kemiskinan															
	Padi	22% /Thn		82,786	94,810	107,241	141,922	177,818	99,106	115,173	97,453	104,716	140.141	120	121	91	74	64
	Jagung	8 % / Thn		10,568	14,108	15,519	17,071	18,436	10,568	13,947	14,147	14,707	45,085	100	99	91	86	245
	Kedelai	7 % / Thn		578	850	950	1,200	1,400	578	707	956	1,428	112	100	83	101	119	8
	Ubi kayu	3 % / Thn		123,205	126,901	130,708	134,629	138,668	97,959	134,661	151,767	144,030	89,167	80	106	116	107	64
	Ubi jalar	1 % / Thn		20.513	21.538	22.615	23.746	24.933	22.547	33.639	44.083	35.421	19.025	110	156	195	149	76

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun ke					Realisasi Tahun ke					Rasio Capain Tahun ke				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Cabe	2.5 % / Thn		2,011	2,061	2,113	2,165	2,219	2,918	2,849	3,354	4,044	5,766	145	138	159	187	260
	Bawang Merah	2 % / Thn		391	398	406	415	423	543	452	304	592	603	139	113	75	143	143
	Jeruk	4.3 % / Thn		6,014	6,225	6,542	6,824	7,117	7,687	12,099	10,094	8,828	9,184	128	194	154	129	129
	Daging Sapi	2.5 % / Thn		2,986	3,060	3,137	3,215	3,296	1,592	2,110	1,994	2,061	2,123	53	69	64	64	64
	Pala	2.1 % / Thn		4,498	4,588	4,680	4,774	4,869	4,456	4,582	4,621	5,029	5,325	99	100	99	105	109
	Cengkih	1.5 % / Thn		14,612	14,831	15,054	15,279	15,509	20,222	20,325	20,767	21,287	21,236	138	137	138	139	137
	Kelapa	2 % / Thn		128,709	131,283	133,909	136,587	139,318	112,261	112,585	112,664	102,589	102,624	87	86	84	75	74

2. Kontribusi Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor pertanian (pertanian dalam arti sempit, perikanan dan kehutanan) menempati posisi pertama terhadap PDRB Provinsi Maluku sebesar 23,4 persen . Kontribusi Bahan makanan terhadap PDRB selama 5 tahun terakhir bertumbuh di atas 2 % . Pada tahun 2018 mencapai 6.11 persen. Kenaikan disebabkan peningkatan produksi pada komoditas tanaman pangan yaitu pada kelompok tanaman tanaman jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan serta produksi pada sektor hortikultura yang mencakup sayuran dan buah-buahan. Pada sisi lain kontribusi sub sektor perkebunan berfluktuatif antara 3,39 – 3,49 persen. Fluktuasi seperti yang disebutkan turut dipengaruhi oleh produksi , produktivitas Tanaman Perkebunan Tahunan dan harga pasar. Komoditas perkebunan Maluku merupakan tanaman tahunan (pala, Kelapa, cengkeh) yang mengalami periode panen raya dan tergantung musim produksi. Sedangkan kontribusi sub sektor peternakan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu dari 0,59 persen menjadi 0,54 persen. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya produksi daging dan telur serta belum berkembangnya produksi hasil-hasil peternakan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah.

3. Produksi Komoditas Pertanian

3.1. Produksi Tanaman Pangan

Produksi tanaman pangan diklasifikasikan dalam dua bagian besar yaitu pangan strategis nasional dan pangan lokal. Komoditas strategis nasional terdiri dari padi, jagung dan kedelai. Produksi padi bersumber dari padi sawah dan padi ladang. Pertumbuhan Produksi padi sawah dan padi ladang sampai akhir periode rata-rata mencapai 4,4 persen. Produksi Tahun 2018 mencapai 128.111 ton GKG sedangkan padi ladang mencapai 12.030 Ton GKG. Produksi padi sawah meningkat dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Peningkatan dipicu oleh peningkatan luas panen yang mencapai 33.365,1 Ha dengan Produktivitas padi sawah mencapai 4.55 Ton/Ha.

Jika dibandingkan dengan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2014-2019) yang menargetkan produksi tahun 2018 harus mampu memenuhi 80 % Kebutuhan Masyarakat (106.691 Ton Beras dari Total kebutuhan 133.363 Ton Beras), maka produksi beras dalam daerah masih belum mencukupi. Produksi beras daerah setara dengan 77,590 Ton atau baru mencapai 58.18 % dari total kebutuhan . Dengan demikian untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Maluku kurang lebih 55.773 Ton (41,42 %) masih didatangkan dari luar daerah.

Terkait dengan peningkatan produksi pangan ke depan , maka beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain :

- Tingkat kehilangan hasil padi masih cukup tinggi yaitu rata-rata 19 % yang terdiri dari panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan
- Beras Maluku kebanyakan dipasarkan di luar daerah . misalnya dari sentra Maluku Tengah ke Papua dan Buru ke Maluku Utara). Padahal masih dibutuhkan di dalam daerah
- Diperlukan strategi khusus untuk memacu petani agar dapat meningkatkan produksi pasca pemberlakuan upsus pajale
- Lahan yang belum memiliki irigasi sebaiknya tidak dibiarkan kosong tetapi digunakan untuk menanam padi lahan kering
- Perlu adanya konsistensi antara perencanaan dan realisasi cetak sawah
- Berdasarkan hasil penelitian Kapasitas Tukar Kation di Lahan sawah Maluku umumnya rendah sehingga dibutuhkan upaya pemupukan baik organik maupun anorganik

Produksi Komoditas Jagung di Maluku tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 126 % . Hal ini merupakan dampak dari program nasional yang turut menunjang meningkatnya luas panen jagung di Maluku (24.723,5 Ha). Namun penambahan luas panen jagung di Maluku belum didukung dengan peningkatan produktivitas yang sesuai data masih tergolong rendah yaitu 2.17 ton/ha. (bandingkan dengan nasional : 5,24 Ton/Ha) Hal ini disebabkan pola pemeliharaan yang belum intensif serta bergesernya musim tanam akibat pengaruh iklim.

Produksi kedelai di tahun 2018 baru mencapai 32 % dari yang ditargetkan, bahkan dibandingkan dengan tahun 2017 juga mengalami penurunan . faktor utama penyebab masalah ini adalah ketersediaan benih dan ketersediaan tenaga kerja.

Produksi ubi kayu tahun 2018 mencapai target sebesar 104 % dan sedikit lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 144.567 Ton . Peningkatan produksi ubi kayu didukung dengan peningkatan produktivitas sebesar 33,3 Ton/ Ha . Hal ini nampak pula pada produksi ubi jalar. Pada tahun 2018 produksi ubi jalar mencapai 35.555 Ton atau melebihi target sebesar 103,71 %.

3.2. Jumlah Produksi dan Produktivitas Komoditas Hortikultura

Komoditas hortikultura yang terdiri dari Bawang merah, cabai dan jeruk mengalami peningkatan dari target tahun 2018. Cabai mencapai 4.039 Ton (181 %) , Bawang merah 592 Ton (139,95 %) dan jeruk sebesar 8.828 Ton (123.92 %). Peningkatan produksi khususnya Cabai dan Bawang Merah ditunjang oleh adanya program nasional di Provinsi Maluku yang berakibat meningkatnya produktivitas dan luas panen. Sesuai data BPS , produktivitas cabai 4,68 Ton/Ha sedangkan Bawang Merah Produktivitasnya 2.51 Ton/Ha .

3.3. Jumlah Produksi Komoditas Peternakan

Produksi komoditas peternakan yang menjadi indikator pengukuran kinerja adalah produksi Daging Sapi. Sesuai data pada tahun 2018 produksi daging sapi baru

mencapai 2.295 Ton atau hanya 97,32 % dari target. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2017 bertambah sebesar 200 ton.

Beberapa permasalahan pengembangan Sapi Potong di Maluku

- Tingginya pengeluaran ternak sapi dari Provinsi Maluku ke Provinsi tetangga
- Jumlah Pemotongan ternak di Rumah Potong Resmi belum terdata dengan baik
- Masih tingginya prevalensi penyakit brucellosis (keguguran)
- Belum optimalnya penerapan inseminasi buatan (IB)
- Tingginya pemotongan ternak betina produktif
- terbatasnya tenaga medis.

3.4. Jumlah Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan

Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan Pala, kelapa dan cengkeh yang merupakan komoditas unggulan daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan . Produksi pala mencapai 5.300 ton atau 108.78 % dari target, Cengkeh , 21.2018 ton atau 112,37 % dari target sedangkan kelapa mencapai 102,725 ton namun pencapaiannya masih 85,42 % dari target. Pada sisi produktivitas , tanaman cengkeh tercatat mengalami peningkatan dari target sedangkan pala dan kelapa belum mencapai. Beberapa faktor yang turut berpengaruh seperti :

- Adanya siklus produksi dua tahunan (panen raya)
- Meningkatnya Luas Tanaman Menghasilkan (TM)
- Sistem budidaya yang masih sederhana dan belum menggunakan pupuk
- Jumlah tanaman tua dan tidak produktif cukup tinggi,
- Adanya serangan hama dan Penyakit di beberapa daerah seperti serangan hama penggerek batang pada tanaman cengkeh (*Nothopeus* sp) dan Tanaman Pala (*Batoceera* sp).

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2014 - 2018

Pendanaan pemangunan pertanian tahun 2014 - 2018 berasal dari Dana APBD , DAK dan APBN. Selama periode pembangunan berlangsung Jumlah APBD mencapai Rp. 323.421.939.292,35 dimana Belanja Langsung sebesar Rp 164.600.147.531 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 95.423.423.761,35 . Dari jumlah Belanja Langsung tersebut sebesar 38,52 % atau Rp 63.398.368.000 merupakan Dana Alokasi Khusus. Pertumbuhan APBD Provinsi Maluku pada Dinas Pertanian selama periode mencapai 8,5 % / Tahun dan realisasi 6,5 %/Tahun.

Pada sisi lain APBN yang dialokasikan ke Dinas Pertanian mencapai Rp 535,281,442,000 dimana Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 103,065,187,000. dan Tugas Pembantuan sebesar Rp 432,216,255,000. Pertumbuhan alokasi APBN terbesar terjadi pada Dana Tugas Pembantuan dengan rata-rata 24,8 %/Tahun . Pertumbuhan ini terjadi karena adanya kebijakan Nasional dalam UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai serta Mengembalikan kejayaan remah-rempah di Maluku.

Selanjutnya Tabel tentang alokasi dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	APBD	55,529,160,284.35	60,582,875,255.00	80,936,690,895.00	64,907,680,377.00	61,465,532,481.00	50,297,184,151.00	58,601,580,800.00	78,918,001,136.00	64,161,341,633.00	56,927,067,618.00	90.58	96.73	97.51	98.85	92.62	4.4	5.30
1.a	Pendapatan	100,000,000.00	135,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	121,940,000.00	155,071,500.00	203,836,000.00	205,049,500.00	201,630,000.00	121.94	114.87	101.92	102.52	100.82	20.8	14.39
1.b	Belanja Tidak Langsung	16,757,501,784.35	20,028,782,755.00	19,492,906,668.00	20,973,496,377.00	18,170,736,177.00	12,635,454,017.00	19,132,827,341.00	19,372,238,381.00	21,377,438,933.00	18,035,762,660.00	75.40	95.53	99.38	101.93	99.26	2.8	11.85
1.c	Belanja Langsung	38,771,658,500.00	40,554,092,500.00	61,443,784,227.00	43,934,184,000.00	43,294,796,304.00	37,661,730,134.00	39,468,753,459.00	59,545,762,755.00	42,783,902,700.00	38,891,304,958.00	97.14	97.32	96.91	97.38	89.83	6.5	4.60
	DAU (Dana Alokasi Umum)	31,214,304,500.00	29,739,092,500.00	37,877,645,227.00	36,249,309,000.00	29,519,796,304.00	30,371,020,034.00	28,925,111,359.00	35,984,088,355.00	35,302,506,700.00	25,306,699,658.00	97.30	97.26	95.00	97.39	85.73	-0.1	2.64
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	593,500,000.00	531,921,000.00	928,139,227.00	679,309,000.00	758,652,604.00	503,827,634.00	504,481,209.00	660,452,775.00	522,124,100.00	544,630,018.00	84.89	94.84	71.16	76.86	71.79	12.2	8.60
	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	1,221,315,000.00	1,425,650,000.00	3,146,830,000.00	1,015,000,000.00	832,412,000.00	1,169,953,800.00	1,382,944,000.00	3,027,587,800.00	984,354,000.00	638,096,325.00	95.79	97.00	96.21	96.98	76.66	12.9	8.62
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	310,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	309,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	99.68	100.00	-	-	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	197,562,000.00	-	-	-	-	194,062,000.00	-	-	-	-	98.23	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	789,204,000.00	-	-	-	-	767,232,850.00	-	-	-	-	97.22	-	-	-	-	-	-
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	115,000,000.00	-	-	-	-	17,000,000.00	-	-	-	-	14.78	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	710,102,000.00	-	-	990,000,000.00	1,132,500,000.00	597,654,700.00	-	-	976,312,000.00	966,791,500.00	-	-	-	98.62	85.37	-	-
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	5,736,249,000.00	-	5,988,700,000.00	-	-	5,654,732,500.00	-	5,698,570,500.00	-	-	-	-	95.16	-	-	-	-
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	12,691,039,000.00	-	-	-	-	12,442,597,450.00	-	-	-	-	98.04	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	5,607,295,000.00	5,184,691,000.00	3,683,550,000.00	16,445,000,000.00	14,581,358,000.00	5,571,754,900.00	4,913,660,200.00	8,225,814,000.00	16,159,827,800.00	11,819,759,515.00	99.37	94.77	94.73	98.27	81.06	34.5	31.3
	Program Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	-	1,115,687,000.00	550,000,000.00	200,000,000.00	127,550,000.00	-	1,099,407,000.00	531,899,500.00	199,675,000.00	1,159,100,000.00	-	98.54	96.71	99.84	90.87	-50.2	52.0
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	948,801,500.00	646,300,000.00	441,000,000.00	350,000,000.00	1,393,500,000.00	948,801,500.00	610,741,250.00	440,879,500.00	349,800,000.00	1,379,105,500.00	100.00	94.50	99.97	99.94	98.97	53.5	52.5
	Program Pengembangan Benih/Bibit Tanaman dan Ternak	-	1,361,121,600.00	1,265,000,000.00	680,000,000.00	800,000,000.00	-	1,340,704,100.00	1,242,800,500.00	654,566,000.00	783,310,000.00	-	98.50	98.25	96.26	97.91	-11.9	11.7
	Program Pencegahan dan Penanggulangan OPT dan Penyakit Ternak	2,604,237,000.00	-	-	-	-	2,503,402,700.00	-	-	-	-	96.13	-	-	-	-	-	-
	Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Penyakit Ternak	-	1,860,041,000.00	1,321,616,000.00	400,000,000.00	318,400,000.00	-	1,769,673,100.00	1,287,251,900.00	396,309,000.00	297,702,000.00	#DIV/0!	95.14	97.40	99.08	93.50	-39.69	40.45
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	-	9,176,710,900.00	2,893,735,000.00	5,260,000,000.00	4,496,129,700.00	-	9,070,250,900.00	2,810,075,440.00	5,156,723,500.00	3,874,905,200.00	-	98.84	97.11	98.04	86.18	-0.41	3.46
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	-	3,075,720,000.00	3,711,025,000.00	8,230,000,000.00	3,292,400,000.00	-	2,941,831,000.00	8,434,183,440.00	7,993,848,000.00	3,265,510,000.00	-	95.65	96.82	97.13	99.18	39.23	40.78
	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	-	2,425,922,000.00	1,658,600,000.00	-	-	-	2,400,236,400.00	1,491,980,000.00	-	-	-	98.94	89.95	-	-	-	-
	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2,625,328,000.00	2,189,450,000.00	1,500,000,000.00	1,456,194,000.00	-	2,582,182,200.00	2,032,593,000.00	1,421,498,900.00	1,301,844,600.00	-	98.36	92.84	94.77	89.40	-17.00	19.92
	Program Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM Pertanian	-	-	-	500,000,000.00	330,700,000.00	-	-	-	487,468,400.00	319,135,000.00	-	-	-	97.49	96.50	-33.86	34.53
	DAK (Dana Alokasi Khusus)	7,557,354,000.00	10,815,000,000.00	23,566,139,000.00	7,684,875,000.00	13,775,000,000.00	7,290,710,100.00	10,543,642,100.00	23,561,674,400.00	7,481,396,000.00	13,584,605,300.00	96.47	97.49	99.98	97.35	98.62	43.22	45.35
	Rehabilitasi/Infrastruktur Sarana dan Prasarana UPTD dan Unit Operasional Daerah	7,557,354,000.00	10,815,000,000.00	23,566,139,000.00	7,684,875,000.00	13,775,000,000.00	7,290,710,100.00	10,543,642,100.00	23,561,674,400.00	7,481,396,000.00	13,584,605,300.00	96.47	97.49	99.98	97.35	98.62	43.22	45.35

Lanjutan Tabel 2.5.

3	APBN	43,532,395,000.00	78,421,559,000.00	129,103,043,000.00	144,595,913,000.00	139,628,532,000.00	42,995,276,315.00	52,460,022,114.00	127,283,760,390.00	113,851,783,782.00	133,463,518,618.00	98.77	-	98.59	78.74	95.58	4.28	59.5	
3.a	Dekonsentrasi	18,988,350,000.00	21,376,718,000.00	25,900,417,000.00	22,469,636,000.00	14,330,066,000.00	18,588,624,815.00	-	25,141,884,600.00	21,388,581,500.00	14,206,212,258.00	97.89	-	97.07	95.19	99.14	-	24.74	56.5
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan (Tanaman Pangan)	3,513,400,000.00	6,796,155,000	6,780,453,000.00	4,863,568,000.00	3,822,314,000.00	3,421,910,000.00	-	6,334,381,600.00	4,760,413,000.00	3,808,547,153.00	97.40	-	93.42	97.88	99.64	-	24.84	57.6
	Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hortikultura Ramah Lingkungan (Hortikultura)	2,707,061,000.00	4,702,543,000	2,851,403,000.00	829,534,000.00	2,181,500,000.00	2,696,739,000.00	-	2,835,618,000.00	828,506,000.00	2,177,575,000.00	99.62	-	99.45	99.88	99.82	-	46.04	81.9
	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (Perkebunan)	1,919,522,000.00	148,884,000	1,819,569,000.00	371,710,000.00	1,078,850,000.00	1,862,572,000.00	-	1,808,040,000.00	371,688,000.00	1,078,331,505.00	97.03	-	99.37	99.99	99.95	-	55.33	85.1
	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (Peternakan dan Kesehatan Hewan)	5,546,117,000.00	5,784,586,000	5,349,592,000.00	-	-	5,531,213,815.00	-	5,250,750,000.00	-	-	99.73	-	-	-	-	-	100.00	33.3
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (BPP-SDM Pertanian)	-	-	-	6,407,244,000.00	5,601,002,000.00	-	-	-	6,217,045,000.00	5,526,086,100.00	-	-	-	97.03	98.66	-	12.58	61.0
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Sarana dan Prasarana)	2,861,850,000.00	800,000,000	9,099,400,000.00	9,997,580,000.00	1,646,400,000.00	2,752,310,000.00	-	8,913,095,000.00	9,210,929,500.00	1,615,672,500.00	96.17	-	97.95	-	98.13	-	36.83	80.7
	Program Peningkatan Nilai tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	2,440,400,000.00	3,944,550,000	-	-	-	2,323,880,000.00	-	-	-	-	95.23	-	-	-	-	-	-	-
3.b	Tugas Pembantuan	24,544,045,000.00	57,044,841,000.00	103,202,626,000.00	122,126,277,000.00	125,298,466,000.00	24,406,651,500.00	52,460,022,114.00	102,141,875,790.00	92,463,202,282.00	119,257,306,360.00	99.44	-	98.97	75.71	95.18	10.47	87.5	
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan (Tanaman Pangan)	-	2,041,840,000.00	35,374,281,000.00	24,028,277,000.00	37,257,072,000.00	-	1,956,733,750.00	35,230,493,240.00	23,102,217,760.00	34,047,703,175.00	-	-	99.59	96.15	91.39	11.49	64.8	
	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (Hortikultura)	341,160,000.00	3,261,290,000.00	6,018,553,000.00	7,298,000,000.00	10,276,300,000.00	341,160,000.00	3,180,440,000.00	6,005,329,000.00	7,170,448,972.00	10,254,890,000.00	100.00	-	99.78	98.25	99.79	31.03	31.21	
	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (Perkebunan)	3,662,885,000.00	35,382,211,000.00	10,198,430,000.00	23,665,101,000.00	37,438,242,000.00	3,610,324,000.00	31,153,511,050.00	10,024,718,550.00	22,135,553,800.00	34,825,629,594.00	98.03	-	98.30	93.54	93.02	95.12	89.07	
	Program Pemenuhan Pangan asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (Peternakan dan Kesehatan Hewan)	15,785,000,000.00	11,419,500,000.00	6,001,067,000.00	8,935,347,000.00	5,866,402,000.00	15,720,167,500.00	11,319,433,900.00	5,928,795,000.00	8,664,855,000.00	5,864,309,000.00	99.59	-	98.80	96.97	99.96	7.27	6.91	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Sarana dan Prasarana)	2,285,000,000.00	-	45,610,295,000.00	58,199,552,000.00	34,460,450,000.00	2,285,000,000.00	-	44,952,540,000.00	31,390,126,750.00	34,264,774,591.00	100.00	-	98.56	53.94	99.43	-	6.59	10.51
	Program Peningkatan Nilai tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	2,450,000,000.00	4,940,000,000.00	-	-	-	2,450,000,000.00	4,849,903,414.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Maluku terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis OPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota di Maluku disajikan pada Tabel 2.5 .

Tabel. 2.6 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi Terhadap Sasaran Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Renstra Pertanian Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
1	Produksi Tanaman Pangan: <ul style="list-style-type: none">• Padi• Jagung• Kedelai	4.4 %/ Tahun 12,4 %/ Tahun 3.7 %/ Tahun	2 - 5 % / Tahun 2 - 5 % / Tahun 2 - 5 % / Tahun	5 %/ Tahun 5 %/ Tahun 5 %/ Tahun
2	Produksi Perkebunan <ul style="list-style-type: none">• Pala• Cengkeh• Kelapa	4.6 % / Tahun 1.2 % / Tahun 0.1 % / Tahun	-	
3	Produksi Peternakan <ul style="list-style-type: none">• Daging Sapi	2.5 % / Tahun		
4	Produksi Hortikultura <ul style="list-style-type: none">• Bawang merah• Cabai	2 % / Tahun 2.5 % / Tahun		

Berdasarkan data pada Tabel 2.5. terlihat bahwa tingkat capaian Sasaran Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku untuk produksi Tanaman Pangan masih di bawah sasaran Renstra Kementerian Pertanian dan lebih tinggi Pertanian dari Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk perkebunan Rata-Rata Pencapaian pertahun untuk komoditas Pala, Kelapa dan Cengkeh sebesar 1,96 %/Tahun Pada sub sektor Peternakan dalam bentuk Daging sapi rata-rata sebesar 2.5 % / Tahun . Untuk sub sektor hortikultura Tanaman Bawang Merah dan Cabe rata-rata pencapaian pertumbuhan 2.25 % / Tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Provinsi Maluku sudah cukup baik secara nasional dan regional. Bila dilihat dari indikator kinerja yang digunakan, terlihat adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pada indikator peningkatan produksi tanaman pangan.

2.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Sedangkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*). Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sektor pertanian bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan sektor pertanian pada sub sektor tertentu dapat memberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca serta berhubungan dengan penurunan kualitas lahan dan air.

Pola perwilayahan di Provinsi Maluku sesuai kondisi fisik daerahnya yang merupakan pulau-pulau, telah dilakukan pendekatan konsep Gugus Pulau (GP) yang mana di setiap GP ditetapkan satu pusat utama atau Pusat GP. Untuk menentukan pusat GP digunakan beberapa pertimbangan antara lain tata jenjang pusat pelayanan dan jangkauannya, karakteristik kota dan wilayah sekitarnya, kebijakan yang terkait dan hasil analisis pola perwilayahan gugus pulau yang telah dilakukan sebelumnya. Penentuan pola perwilayahan di Provinsi Maluku mengacu pada faktor pertimbangan di atas sehingga diperoleh suatu pola yang optimal dan efisien, serta pemerataan dalam pelayanan fasilitas kehidupan.

Tabel 2.7
Telaahan Rencana Struktur Ruang Wilayah (RTRW)

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan pelayanan Dinas	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi : Kota Ambon	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi : Kota Ambon	<p>a. Percepatan Pembangunan Kota-kota Utama Perbatasan berupa Pengembangan Kota Baru</p> <p>b. Pengembangan Kota Sentra Produksi Pertanian</p> <p>c. Pengembangan Bandara</p> <p>d. Pengembangan Pelabuhan</p> <p>e. Pengembangan Transportasi (jalan arteri Nasional, Kolektor primer, lokal primer</p> <p>f. Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air</p>	<p>a. Pembinaan dan Pengembangan sentra produksi komoditas pertanian</p>	<p>Ilwaki (12), Dobo (9), Saumlaki (10), Tual (8), Benjina (9)</p> <p>Namlea (1), Kairatu(2)Wahai (3)</p> <p>Benjina (9), Namlea (1), Namrole (1), Bula (4), Bandanaira (6), Tual (8) dan Kisar (11)</p> <p>Semua Gugus Pulau</p> <p>Semua Gugus Pulau</p> <p>P. Buru (1), P. Ambon (7), P. Seram (2,3,4), Kep. Kei (8), Kep. Aru (9), Kep. Yamdena (10) -P. Wetar (12)</p>
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi : Namlea, Kairatu, Wahai, Werinama, Bula, Masohi, Tual	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi : Namlea, Kairatu, Wahai, Werinama, Bula, Masohi, Tual			
3	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi : Dobo, Saumlaki, Ilwaki				
4	Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSP) meliputi : Piru/Dataran Honipopu Hunimoa, Banda Naira, Tapa, Serwaru dan Benjina	Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSP) meliputi : Piru/Dataran Honipopu Hunimoa, Banda Naira, Tapa, Serwaru dan Benjina			
5	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi : Namrole, Leksula, Teluk Bara, Elfule, Waenetat, Ilath, Geser, Kataloka, Bula, Werinama, Amahai, Tehoru, Saparua, Pelauw, Tulehu, Jerol, Larat, Lelang, Wonreli	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi : Namrole, Leksula, Teluk Bara, Elfule, Waenetat, Ilath, Geser, Kataloka, Bula, Werinama, Amahai, Tehoru, Saparua, Pelauw, Tulehu, Jerol, Larat, Lelang, Wonreli			

Tabel 2.8.
Telaahan Rencana Pola Ruang Wilayah (RTRW)

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan pelayanan Dinas	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas
1	Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya tersebar di seluruh Gugus Pulau sesuai dengan potensi	<p>Pengembangan dan Pengendalian Kawasan untuk sektor Pertanian :</p> <p>a. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian</p> <p>b. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perkebunan</p>		<p>Kawasan Buru 1), Kawasan Seram (2, 3), Kawasan Seram Timur (4), Kawasan Seram Selatan (5), Kawasan Ambon (7), PP Lease (7), Kawasan Kei (8)-Aru (9)-P.Wetar (12)-P.Tanimbar (10)</p> <p>Kawasan Buru (1), Kawasan Seram (2, 3), Kawasan Seram Timur (4), Kawasan Seram Selatan (5), Kepulauan Banda (6), Kawasan Ambon (7), PP Lease (7), Kawasan Kei (8)-Aru (9)-P.Wetar (12)-P.Tanimbar (10)</p>

Tabel 2.9

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Biofisik Maluku dalam pemanfaatannya telah mengalami degradasi sehingga terjadi kerusakan DAS dan timbulnya lahan kritis • Terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan terganggunya produksi pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Debit air untuk daerah irigasi berkurang dan terjadi sedimentasi • Menurunnya luas tanam dan panen komoditas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan instansi terkait untuk perbaikan kapasitas daya dukung lingkungan • Regulasi tentang lahan pangan
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Fenomena perubahan iklim • Meningkatnya jumlah penduduk sehingga beban lingkungan semakin bertambah 	<ul style="list-style-type: none"> • Gagalnya panen komoditas • Berubahnya musim panen bagi komoditas pertanian tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Antisipasi perubahan iklim melalui Perencanaan musim tanam yang tepat dan penyiapan sarana untuk antisipasi
3	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak lahan pertanian yang belum tertanami secara teratur • Masih belum dimanfaatkannya limbah panen komoditas dengan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi dan nilai tambah komoditas menjadi rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan program dan kegiatan untuk pemanfaatan lahan dan pengolahan hasil pertanian
4	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Komoditas pertanian musiman sangat rentan terhadap perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Memicu inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menanam varitas yang tidak rentan • Melakukan tindakan antisipatif
5	Perlindungan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> • Belum seluruh plasma nuftah diidentifikasi • Dengan wilayah geografis yang luas terdapat berbagai keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya komoditas pertanian yang spesifik lokalita 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi, penilaian dan pelepasan sebagai varitas unggulan

2.6. Peluang pembangunan Pertanian di Provinsi Maluku

Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan pertanian pada masa yang akan datang :

- a. Instansi yang menangani Pertanian di Provinsi Maluku dan Kabupaten / Kota beserta kelembagaannya
- b. Potensi sumberdaya lahan dan air
- c. Prospek pasar bagi produk pertanian seiring pertambahan jumlah penduduk .
- d. Posisi Maluku sebagai daerah kepulauan yang terletak di jalur perdagangan internasional.
- e. Perkembangan Ilmu dan teknologi yang memungkinkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian.
- f. Kebijakan Pemerintah dalam mendukung pembangunan pertanian
- g. Komoditas unggulan Maluku yang telah dikenal sejak lama oleh petani dan dunia internasional

2.3.2. Tantangan pembangunan Pertanian di Provinsi Maluku

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan pertanian di Maluku ialah:

- a. Mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana pembangunan pertanian.
- b. Memperbaiki citra pertanian dan petani agar diminati kembali oleh generasi muda
- c. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan petani dalam menjalankan usaha tani .
- d. Mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur
- e. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian sebagai sumber pangan bahan baku industri maupun ekspor
- f. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian
- g. Mengatasi ancaman penyakit ternak dan Hama/Penyakit Tanaman
- h. Meningkatkan keterpaduan kelembagaan lintas sektoral dalam menunjang pembangunan pertanian
- i. Mengembangkan upaya antisipasi Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian lima tahun ke depan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, renstra K/L dan renstra SKPD provinsi/kabupaten/ kota, telaahan RTRW serta analisis KLHS

Berdasarkan informasi tersebut dapat diuraikan identifikasi permasalahan seperti dapat dilihat pada Tabel 3.1 .

Tabel. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian
			Internal (Kewenangan Dinas)	Eksternal (Di Luar Kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
1. Gambaran pelayanan OPD	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Hortikultura	1 Sasaran Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Anggaran 2. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan Produksi 3. Ketersediaan petugas lapangan 4. Penguatan Kelembagaan Pertanian 5. Penerapan sistem budidaya tanaman dan ternak yang baik dan benar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya alih fungsi lahan 2. Menurunnya kesuburan lahan 3. Terbatasnya tenaga kerja 4. Sarana dan prasarana terbatas 5. Rusaknya infrastruktur 6. Menurunnya debit air 7. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana, modal dan pemasaran 8. Tingginya kehilangan hasil 9. Breeding farm belum tersedia 10. Tingginya pengeluaran ternak 11. Terbatasnya pakan ternak unggas 12. Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian 13. Pulau-pulau kecil dengan sumberdaya alam terbatas 14. Perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya produksi dan produktivitas dan mutu produk pertanian 2. Perubahan iklim 3. Kurangnya ketersediaan infrastruktur Sarana parasana, lahan dan air 4. Menurunnya kesuburan lahan 5. Sistem perbenihan belum berjalan optimal 6. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap permodalan dan sarana prasarana 7. Kualitas SDM Pertanian masih rendah 8. Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian 9. Tingginya kehilangan hasil 10. Breeding farm belum tersedia 11. Tingginya pengeluaran ternak dan pemotongan ternak produktif 12. Kurangnya tenaga inseminator 13. Terbatasnya pakan ternak unggas. 14. Meningkatnya OPT dan penyakit ternak 15. Lemahnya kapasitas kelembagaan pertanian 16. Belum padunya antara sektor dalam pembangunan pertanian 17. Nilai Tambah Produk pertanian masih rendah

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian
			Internal (Kewenangan Dinas)	Eksternal (Di Luar Kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
2.Kajian Renstra OPD Lingkup Pertanian Kab/Kota	2.Peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	2. Sasaran Produksi pada masing-masing renstra kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan Produksi 2. Ketersediaan petugas lapangan 3. Penguatan Kelembagaan Pertanian 4. Penerapan sistem budidaya tanaman dan ternak yang baik dan benar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya alih fungsi lahan 2. Menurunnya kesuburan lahan 3. Terbatasnya tenaga kerja 4. Sarana dan prasarana terbatas 5. Rusaknya infrastruktur 6. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana, modal dan pemasaran 7. Tingginya kehilangan hasil 8. Breeding farm belum tersedia 9. Tingginya pengeluaran ternak 10. Terbatasnya pakan ternak unggas 11. Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian 12. Pulau-Pulau Kecil dengan sumberdaya alam terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya produksi dan produktivitas dan mutu produk pertanian 2. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim 3. Kurangnya ketersediaan infrastruktur Sarana parasma, lahan dan air 4. Menurunnya kesuburan lahan 5. Sistem perbenihan belum berjalan optimal 6. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap permodalan dan sarana 7. Kualitas SDM Pertanian masih rendah 8. Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian 9. Tingginya kehilangan hasil 10. Breeding farm belum tersedia 11. Tingginya pengeluaran ternak dan pemotongan ternak produktif 12. Kurangnya tenaga penyuluh, pengamat OPT, Pengawas Benih Tanaman serta tenaga Kesehatan Hewan 13. Terbatasnya pakan ternak unggas. 14. Meningkatnya OPT dan penyakit ternak 15. Lemahnya kapasitas kelembagaan pertanian 16. Belum padunya antara sektor dalam pembangunan pertanian

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian
			Internal (Kewenangan Dinas)	Eksternal (Di Luar Kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
3. Kajian Renstra K/L	Peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Sasaran Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam peningkatan Produksi 2. Ketersediaan petugas lapangan 3. Penguatan Kelembagaan Pertanian 4. Penerapan sistem budidaya tanaman dan ternak yang baik dan benar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali 2. Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru 3. Penurunan kualitas lahan 4. Kerusakan jaringan irigasi yang tinggi 5. Sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam 6. Belum terbangunnya sistem pembibitan sapi 7. Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat 8. Kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju 9. Menurunnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian 10. Keterbatasan tenaga penyuluh, pengamat OPT, Pengawas Benih Tanaman serta tenaga Kesehatan Hewan 11. Akses petani terhadap modal dan sarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim 2. Kurangnya ketersediaan infrastruktur Sarana parasma, lahan dan air 3. Menurunnya kesuburan lahan 4. Sistem perbenihan belum berjalan optimal 5. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap permodalan dan sarana 6. Kualitas SDM Pertanian masih rendah 7. Menurunnya minat generasi muda di bidang pertanian 8. Tingginya kehilangan hasil 9. Belum terbangunnya sistem pembibitan 10. Kurangnya tenaga penyuluh, pengamat OPT, Pengawas Benih Tanaman serta tenaga Kesehatan Hewan 11. Terbatasnya pakan ternak unggas. 12. Rendahnya Minat generasi muda di bidang pertanian 13. Meningkatnya OPT dan penyakit ternak 14. Lemahnya kapasitas kelembagaan pertanian 15. Belum padunya antara sektor dalam pembangunan pertanian

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian
			Internal (Kewenangan Dinas)	Eksternal (Di Luar Kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
4. Kajian RTRW	Pengoptimalan lahan dan pengembangan kawasan berbasis sudah berjalan, namun belum optimal	Luas tanam	Pembinaan dalam rangka pengoptimalan lahan	Kawasan hutan lindung dan lainnya	Belum optimalnya pemanfaatan lahan
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perambahan lahan konservasi 2. Degradasi lahan akibat kehilangan unsur hara dan bahan organik 3. Pemanfaatan lahan pertanian melalui Perladangan Bepindah 4. Efek Rumah Kaca 	Tingkat Produksi	1. Komitmen Pimpinan dan jajarannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya alih fungsi lahan 2. Menurunnya kesuburan lahan 3. Perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas 2. Resiko penggunaan lahan yang lestari

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada Tabel 3.1, maka faktor kunci keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengatasi semua permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas.
2. Peningkatan mutu sumber daya pertanian (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Buatan, dan Sumber Daya Alam).
3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian.
4. Peningkatan akses petani/kelompok tani ke sumber pembiayaan.
5. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani.
6. Peningkatan peran/kompetensi petugas lapang (POPT, Penyuluh, PBT, dan PIP) dan petani/kelompok tani.
7. Perbaikan infrastruktur pertanian (jalan usaha tani, jaringan irigasi).
8. Peningkatan mutu hasil pertanian yang memenuhi standar dan berdaya saing.
9. Pemanfaatan peluang pasar regional dan global.
10. Penumbuhan kemitraan dengan stakeholder terkait.
11. Peningkatan sinergitas antar unit kerja lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
12. Penempatan aparatur harus sesuai dengan kompetensinya

3.2. Lingkungan Strategis

Dalam konteks lingkungan strategis global dalam jangka panjang, Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, sekitar 262 juta orang pada tahun 2017 yang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 318 juta orang pada tahun 2045. Penduduk dunia juga terus meningkat dari 7,5 miliar orang pada tahun 2017 menjadi sekitar 9,5 miliar pada tahun 2045. Hal ini berarti kebutuhan pangan akan terus meningkat. Sementara itu, kapasitas memproduksi pangan cenderung menurun seiring dengan keterbatasan lahan, penurunan kesuburan tanah, dan perubahan iklim global.

Dinamika lingkungan strategis global yang mempengaruhi sektor pertanian terdiri dari:

- 1) Perubahan iklim dan lingkungan hidup serta ancaman krisis pangan

Fenomena pemanasan global merupakan faktor pendorong perubahan mendasar pada pertanian, sosial, ekonomi maupun politik global. Dampak langsung perubahan iklim pada pertanian adalah melalui degradasi sumber daya pertanian dan infrastruktur, seperti degradasi sumberdaya lahan, potensi sumberdaya air, kerusakan sumberdaya genetik, kapasitas irigasi serta epidemi hama dan penyakit tanaman dan hewan. Selain itu, pada kondisi variabilitas curah hujan yang ekstrim dan dengan pengelolaan yang kurang tepat, akan menyebabkan banjir, longsor dan kekeringan. Dampak tersebut berlanjut kepada gangguan terhadap sistem produksi pertanian, terutama pangan, seperti penurunan dan ketidakpastian produktivitas dan luas panen, yang berujung pada ancaman rawan pangan serta peningkatan kemiskinan.

- 2) Perdagangan, investasi dan politik global

Perpaduan antara kesepakatan perdagangan dan investasi multilateral, regional dan bilateral yang kesemuanya mendorong liberalisasi, standardisasi dan transparansi di satu

sisi dan revolusi teknologi informasi dan transportasi yang memungkinkan pergerakan masyarakat, barang dan informasi berjalan semakin cepat di sisi lain, telah menisbikan sekat-sekat antar negara. Informasi tentang inovasi pertanian semakin mudah diperoleh, transaksi pasar hasil pertanian semakin terbuka dan mudah diikuti. Dalam kondisi semacam ini akan semakin sulit bagi suatu negara untuk memproteksi masyarakatnya dari serbuan produk dari negara lain, sehingga upaya ke arah pengembangan produksi yang efisien perlu terus dikembangkan. Pada sisi lain dengan adanya liberalisasi perdagangan akan terjadi perubahan pola pasar. Terhadap kondisi ini dibutuhkan nilai tambah dalam bentuk kuantitas maupun kualitas produk pertanian.

3) Perkembangan IPTEK pertanian

Salah satu ciri pertanian yang maju adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk pengambilan keputusan serta pemakaian kemajuan teknologi sebagai instrumen utama pada pemanfaatan sumber daya dan perekayasa untuk meningkatkan nilai tambah dan meminimalkan ketergantungan terhadap alam. Oleh karena itu pembangunan pertanian perlu responsif terhadap inovasi IPTEK tetapi selaras dengan lingkungan lokal. Pada masa depan tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi tinggi dalam bidang bioteknologi dan telekomunikasi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin guna meningkatkan produktivitas maupun mutu serta nilai tambah produk pertanian.

4) Pengembangan Bioekonomi

Bioekonomi mengacu pada semua aktivitas ekonomi menggunakan sumberdaya hayati untuk menghasilkan bahan kimiawi, material dan bahan bakar nabati untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan bioekonomi dipacu oleh semakin tingginya tuntutan atas produk pangan berkualitas termasuk functional food. Pengembangan bioekonomi juga telah berkontribusi nyata pada peningkatan harga komoditas pangan utama dunia selama beberapa tahun terakhir. FAO memperkirakan ke depan era harga bahan pangan murah telah berakhir, dan hal ini salah satunya dipicu karena makin beragamnya pemanfaatan pangan, termasuk untuk sumber energi dan produk turunan lainnya yang terkait dengan bioekonomi.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Menelaah visi, misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinannya Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang dapat mempengaruhi pencapaiannya.

Visi Pemerintah Provinsi Maluku seperti tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku periode 2019-2024 adalah sebagai berikut.

**“ Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani,
Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan
Kepulauan”**

Adapun Misi yang diusung untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Jujur dan Melayani

2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan , murah dan terjangkau

3. Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas Gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
6. Mewujudkan Sumberdaya manusia yang professional , kreatif, mandiri dan berprestasi

Dari misi tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku sesuai tugas pokok dan fungsinya berupaya untuk mendukung pembangunan daerah melalui Misi 3 dan 6.

Selanjutnya untuk melihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel.3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Provinsi Maluku Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Gubenur dan Wakil Gubenur.

Visi: Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wagub Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A	MISI 3 : Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berkelanjutan			
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparatur Dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai. 2. Peran dan fungsi UPTD belum optimal. 3. Sinergitas Tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin dengan baik. 4. Kurangnya Petugas / Aparatur Lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Pertanian 2. Menurunnya minat generasi muda terhadap usaha tani. 3. Kemampuan permodalan petani terbatas. 4. Penerapan teknologi pertanian terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Dinas dalam pengembangan Agribisnis 2. Komitmen pimpinan dalam peningkatan ketahanan pangan. 3. Ketersediaan sumber daya pertanian 4. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian. 5. Dukungan anggaran.
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi pangan strategis beras belum mencukupi kebutuhan masyarakat 2. Pangan lokal belum tersedia secara cukup dan merata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya alih fungsi lahan. 2. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian 3. Terbatasnya sarana dan prasarana 4. Perubahan iklim 5. Penerapan teknologi pertanian terbatas 6. Pulau-pulau kecil dan SDA terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembangunan pertanian 2. Dukungan anggaran 3. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian 4. Dukungan SDM Pertanian 5. Potensi lahan kering 6. Regulasi lahan pangan pertanian berkelanjutan.

No	Misi dan Program Gubernur dan Wagub Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran komoditas masih terbatas 2. Kurangnya kerjasama pemasaran 3. Volume ekspor komoditas perkebunan masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif peningkatan mutu masih rendah 2. Nilai tambah dan Daya saing produk perkebunan masih rendah. 3. Asosiasi Tanaman Perkebunan belum berkembang 4. Kualitas dan kuantitas Produk Unggulan rendah 5. Informasi pasar belum dimiliki petani secara kontinyu 6. Pengolahan hasil belum berkembang 7. Rantai pemasaran masih panjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduksi dan inovasi pengolahan hasil pertanian 2. Pengembangan informasi dan akses pasar 3. Promosi komoditas unggulan 4. Laboratorium uji mutu
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1. Produksi dan produktivitas komoditas pertanian masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan lahan terkendala status lahan dan kawasan 2. Rusaknya DAS sumber air irigasi 3. Fenomena perubahan iklim 4. Terbatasnya tenaga kerja 5. Koordinasi lintas sektoral dan antara jenjang pemerintahan belum optimal 6. Terbatasnya anggaran 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana 8. Sistem budidaya masih sederhana 9. Serangan hama dan penyakit 10. Kualitas SDM yang belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditas unggulan yang telah lama dikenal 2. Regulasi mendukung pembangunan pertanian 3. Dukungan pemerintah pusat dan daerah 4. Komitmen SKPD terkait pembangunan pertanian 5. Keberadaan data dan informasi

No	Misi dan Program Gubernur dan Wagub Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan	1. Penyediaan Bibit unggul belum memenuhi kebutuhan pengembangan komoditas pertanian/ perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi bibit bersertifikat masih kurang 2. Sertifikasi Bibit belum dapat menjangkau semua lokasi 3. Jumlah kebun sumber bibit masih kurang 4. plasma nutfah bernilai ekonomi belum diidentifikasi dan dilepaskan secara menyeluruh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembangunan pertanian yang membutuhkan bibit unggul 2. Peningkatan produksi komoditas pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pasar 3. Regulasi
6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1. Penerapan teknologi budidaya dan pengolahan hasil masih belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SDM Petugas yang menguasai teknologi masih kurang 2. Rendahnya kualitas SDM petani 3. produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian /perkebunan masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pengembangan inovasi teknologi pertanian 2. Ketersediaan Hasil kajian lembaga penelitian
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penyuluh pertanian masih rendah 2. Kapasitas dan Kompetensi SDM aparatur penyuluh pertanian masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana kebutuhan penyuluh pertanian 2. Penyuluh usia lanjut memasuki pensiun 3. Alih status penyuluh 4. Koordinasi belum optimal antar jenjang pemerintahan 5. Terbatasnya anggaran untuk operasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah untuk regenerasi penyuluh pertanian 2. Ketersediaan anggaran BOP 3. Tersedianya Balai Diklat Penyuluh 4. Regulasi
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1. Adanya serangan penyakit zoonosis dan hewan menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga kesehatan hewan 2. Geografis wilayah 3. Keterbatasan sarana pengendalian 4. Lalu lintas ternak yang tidak terpantau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi kesehatan hewan 2. Tersedianya laboratorium 3. system pengendalian penyakit hewan nasional

No	Misi dan Program Gubernur dan Wagub Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Produksi pangan hewani dari ternak belum memenuhi kebutuhan dalam daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Tersedianya Breeding Farm DOC 2. Pakan unggas yang terbatas dan didatangkan dari luar daerah 3. Masih kurangnya toko sarana produksi peternakan 4. Terbatasnya akses transportasi dari sentra produksi 5. Pengeluaran ternak ke luar daerah 6. Pemotongan hewan betina produktif masih tinggi 7. Menurunnya kualitas genetik sapi potong 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pengembangan peternakan nasional 2. Regulasi Peternakan 3. Inovasi teknologi pengembangan ternak
10	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran komoditas masih terbatas 2. Pemasaran antar pulau seringkali tidak terdeteksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai tambah dan Daya saing produk masih rendah 2. Upaya Pemasaran masih rendah 3. Informasi pasar belum dimiliki Pengolahan hasil belum berkembang 4. Rantai pemasaran masih panjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduksi dan inovasi pengolahan hasil pertanian 2. Pengembangan informasi dan akses pasar 3. Promosi komoditas 4. Laboratorium kesmavet
11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1. Pola budidaya ternak masih dilakukan secara sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SDM Petugas yang menguasai teknologi masih kurang 2. Rendahnya kualitas SDM peternak 3. keterbatasan modal dan sarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pengembangan inovasi teknologi peternakan 2. Ketersediaan Hasil kajian lembaga penelitian

No	Misi dan Program Gubernur dan Wagub Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya serangan OPT pada tanaman pertanian dan perkebunan 2. Tingginya kehilangan hasil akibat serangan OPT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan iklim 2. Ketersediaan Petugas pengamat OPT yang terbatas 3. Terbatasnya sarana dan prasarana 4. Pengetahuan dan ketrampilan petani untuk pengendalian masih rendah 5. lalulintas tanaman yang tidak terkontrol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pengendalian OPT 2. Tersedianya teknologi pengendalian yang ramah lingkungan 3. Regulasi pengendalian OPT 4. Ketersediaan Hasil kajian lembaga penelitian
13	Program Pengembangan Bibit Unggul Peternakan	1. Penyediaan Bibit unggul peternakan belum memenuhi kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia breeding farm 2. Petugas perbibitan ternak yang terbatas 3. Tingginya pemotongan hewan betina produktif 4. Unit operasional perbibitan ternak belum berkembang optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pengembangan bibit ternak unggul 2. Inovasi dan teknologi perbibitan ternak 3. Regulasi perbibitan ternak 4. Tersedianya Unit operasional perbibitan ternak

3.3. Telaah Renstra Kementerian Pertanian dan Kabupaten/ Kota

Hasil Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian dan renstra kabupaten/kota, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan dan kualitas kinerja sepanjang 5 tahun ke depan. Hasil telaahan seperti terurai dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya

No	Sasaran jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian 2020 - 2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan hasil Pertanian - Produksi Padi (GKG) : 4,7%/Thn - Produksi Jagung : 15,2%/Thn - Produksi Daging Sapi : 15% / Thn	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran yang diberikan dalam pencapaian sasaran • Ketersediaan SDM • Dukungan teknologi belum dioptimalkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak perubahan iklim • Menurunnya kesuburan lahan • Infrastruktur dasar belum tersedia dalam jumlah yang cukup • Produksi dan Produktivitas masih rendah • Terbatasnya tenaga kerja • Menurunnya minat generasi muda • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung • Daya saing produk pertanian masih rendah • Kemampuan permodalan petani terbatas • Rendahnya SDM Petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen SKPD terkait pembangunan pertanian • Regulasi mendukung pembangunan pertanian • Dukungan pemerintah pusat dan daerah • Keberadaan data dan informasi yang lengkap • Permintaan pasar dalam dan luar negeri • Potensi lahan dan agroekosistem
2	Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan SDM			
3	Peningkatan Prduktivitas dan Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pertanian belum dikmbangkan optimal 		

Adapun telahan terhadap Renstra Kabupaten/Kota dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Provinsi Maluku diuraikan dalam dan tabel 3.5

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya

No	Sasaran jangka Menengah Renstra Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1 2	Peningkatan produksi dan produktivitas Peningkatana pengolahan hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan anggaran • Koordinasi beum optimal • Dukungan teknologi belum dioptimalkan • Kurangnya ketersediaan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak perubahan iklim • Menurunnya kesuburan lahan • Infrastruktur dasar belum tersedia dalam jumlah yang cukup • Terbatasnya tenaga kerja • Menurunnya minat geenerasi muda • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung • Daya saing produk pertanian masih rendah • Kemampuan permodalan petani terbatas • Rendahnya SDM Petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi mendukung pembangunan pertanian • Dukungan pemerintah pusat dan daerah • Komitmen SKPD terkait pembangunan pertanian • Keberadaan data dan informasi yang lengkap

3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi; pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWP disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Provinsi, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar Provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Provinsi juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWP.

Sedangkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sektor pertanian bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Sebab pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Pola perwilayahan di Provinsi Maluku sesuai kondisi fisik daerahnya yang merupakan pulau-pulau, telah dilakukan pendekatan konsep Gugus Pulau (GP) yang mana di setiap GP ditetapkan satu pusat utama atau Pusat GP. Untuk menentukan pusat GP digunakan beberapa pertimbangan antara lain tata jenjang pusat pelayanan dan jangkauannya, karakteristik kota dan wilayah sekitarnya, kebijakan yang terkait dan hasil analisis pola perwilayahan gugus pulau yang telah dilakukan sebelumnya. Penentuan pola perwilayahan di Provinsi Maluku mengacu pada faktor pertimbangan di atas sehingga diperoleh suatu pola yang optimal dan efisien, serta pemerataan dalam pelayanan fasilitas kehidupan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka di Provinsi Maluku telah ditetapkan 12 Gugus Pulau (GP). Setiap gugus pulau tersebut memiliki wilayah pelayanannya masing-masing sesuai dengan daya jangkau pusat-pusat gugus dan pulau-pulau di

sekitarnya, dan sesuai kriteria penetapan Gugus Pulau tersebut diatas. Gugus Pulau (GP) tersebut adalah :

- 1) Gugus Pulau I, Pulau Buru dengan pusat pelayanan di Kota Namlea;
- 2) Gugus pulau II, Seram Barat dengan pusat pelayanan di Kota Piru dan Kairatu;
- 3) Gugus Pulau III, Seram Utara dengan pusat pelayanan di Kota Wahai;
- 4) Gugus Pulau IV, Seram Timur dengan pusat pelayanan di Kota Bula;
- 5) Gugus Pulau V, Seram Selatan dengan pusat pelayanan di Kota Masohi;
- 6) Gugus Pulau VI, Kepulauan Banda dan Teon Nila Serua dengan pusat pelayanan di Kota Bandaneira;
- 7) Gugus Pulau VII, Ambon dan PP Lease dengan pusat pelayanan di Kota Ambon;
- 8) Gugus Pulau VIII, Kepulauan Kei dengan pusat pelayanan Kota Tual;
- 9) Gugus Pulau IX, Kepulauan Aru dengan pusat pelayanan Kota Dobo;
- 10) Gugus pulau X, Pulau Tanimbar dengan pusat pelayanan Kota Saumlaki;
- 11) Gugus Pulau XI, Kepulauan Babar dengan pusat pelayanan Kota Tepa;
- 12) Gugus Pulau XII, Kepulauan PP Terselatan dan Wetar dengan pusat pelayanan Kota Serwaru

Gugus Pulau berdasarkan potensi pengembangan dan rencana pengembangan infrastruktur dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Gugus Pulau Berdasarkan Potensi Pengembangan

No	Gugus Pulau	Fungsi dan Prioritas Pengembangan	Rencana Pengembangan Infrastruktur
1.	Buru	1. Perkebunan 2. Perikanan 3. Pertanian 4. Peternakan 5. Pariwisata 6. Kehutanan.	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, bandara, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
2	Seram Barat	1. Pertanian 2. Perkebunan 3. Perikanan 4. Pariwisata 5. Pertambangan 6. Industri.	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
3.	Seram Utara	1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Perkebunan 4. Perikanan 5. Pariwisata	Fasilitas pelayanan publik tingkat kabupaten, pelabuhan regional, jaringan jalan darat.
4.	Seram Timur	1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Perkebunan 4. Perikanan 5. Pariwisata	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, bandara, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk

		6. Pertambangan.	Trans Maluku.
5.	Seram Selatan	1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Perkebunan 4. Perikanan 5. Pariwisata.	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
6.	Kepulauan Banda dan TNS	1. Perikanan 2. Pariwisata 3. Perkebunan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, bandara.
7.	Ambon dan PP Lease	1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Perkebunan 4. Perikanan 5. Pariwisata 6. Pendidikan 7. Pemerintahan. 8. Jasa	Fasilitas pelayanan publik tingkat nasional dan provinsi, pelabuhan nasional dan penyeberangan, bandara pusat penyebaran tersier, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
8.	Kepulauan Kei	1. Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Perkebunan 5. Industri 6. Pariwisata 7. Pendidikan.	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
9.	Kepulauan Aru	1. Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Perkebunan 5. Industri 6. Pertahanan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
10.	Pulau tanimbar	1. Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Perkebunan 5. Industri 6. Pendidikan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan nasional dan penyeberangan, bandara pusat penyebaran tersier, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
11.	Kepulauan Babar	1. Pertambangan 2. Perikanan 3. Peternakan 4. Pariwisata 5. Pertahanan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
12.	Kepulauan PP Terselatan dan Wetar	1. Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertahanan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, bandara, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.

Dalam konsep RTRWP sektor pertanian merupakan bagian dalam rencana pengembangan kawasan budidaya yaitu kawasan yang berada di luar kawasan lindung yang berdasarkan kondisi fisiknya dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan produksi maupun bagi pemenuhan kebutuhan permukiman. Kawasan Budidaya pertanian meliputi :

- (a). Lahan Basah
- (b). Perkebunan/Pertanian
- (c). Tanaman Kering
- (d). Peternakan.

Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari kawasan hutan produksi, pertanian, pertambangan, peruntukkan industri, pariwisata dan permukiman. Kawasan budidaya ini dalam hal pengelolaannya perlu mempertimbangkan kondisi wilayah rawan bencana alam. Perincian mengenai rencana pengelolaan kawasan budidaya diuraikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya Pertanian

No	Fungsi	Rencana		Lokasi
		Diperbolehkan	Dilarang, diperbolehkan dengan syarat	
1	Pertanian Lahan Basah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman padi sesuai dengan pola tanam. 2. Penanaman tanaman selain padi sesuai ketersediaan air dan optimalitas kemampuan produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan fisik yang tidak mendukung kegiatan pertanian. 2. Pemanfaatan lahan untuk pertanian bukan lahan basah. 	Kab. Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat.
2	Perkebunan/Pertanian Lahan Kering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan agroindustri dan agrowisata. 2. Usaha pertambangan yang memiliki nilai tinggi dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. 3. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis. 	Tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Maluku.

		jaringan irigasi, pipa minyak dan gas dengan syarat tidak menurunkan daya dukung kawasan konservasi sebagai kawasan pertanian lahan basah.		
	3. Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan. 2. Kegiatan penelitian/ pengembangan teknologi peternakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen. 2. Kegiatan yang berdampak negatif terhadap produktivitas peternakan dan kualitas lingkungan. 	Tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Maluku.

Hasil telaahan tata ruang wilayah Provinsi Maluku sehubungan dengan permasalahan pelayanan Dinas Pertanian diuraikan dalam Tabel 3.8

Tabel 3.8. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Pendorong dan Penghambat.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah tentang Perlindungan lahan pangan berkelanjutan belum tersedia baik untuk pangan strategis maupun lokal • Konsep pengembangan berbasis gugus pulau belum dilaksanakan secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Acuan bagi pemangku kebijakan dalam bentuk Perda belum tersedia • Potensi alih fungsi lahan besar akibat perhitungan nilai ekonomi di kalangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningatan kerjasama antara pemangku kepentingan • Tersedianya Perda tentang pemanfaatan lahan • Penegakan hukum terkait pemanfaatan lahan • Letak geografis Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil analisa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terhadap Dinas Pertanian provinsi Maluku diperoleh hasil sebgaiman tertera pada tabel 3.9

Tabel 3.9. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Berdasarkan hasil analisis KLHS beserta Faktor Pendorong dan Penghambat.

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Biofisik Maluku dalam pemanfaatannya telah mengalami degradasi sehingga terjadi kerusakan DAS dan timbulnya lahan kritis • Terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan terganggunya produksi pangan • Fenomena perubahan iklim • Meningkatnya jumlah penduduk sehingga beban lingkungan semakin bertambah • Masih banyak lahan pertanian yang belum tertanami secara teratur • Masih belum dimanfaatkannya limbah panen komoditas dengan optimal • Komoditas pertanian musiman sangat rentan terhadap perubahan iklim • Belum seluruh plasma nuftah diidentifikasi • Dengan wilayah geografis yang luas terdapat berbagai keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah tentang Perlindungan lahan pangan berkelanjutan belum tersedia baik untuk pangan strategis maupun lokal • Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang pertanian yang ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan cara cara yang tidak ramah lingkungan dalam bertani seperti ladang berpindah • Perilaku petani dalam penggunaan pupuk dan pestisida an organik secara berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang – Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan pangan pertanian berkelanjutan • Perda nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelestarian sagu • Ketersediaan lingkungan hidup

1.5. Isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu pertanian di Provinsi Maluku mencakup aspek seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, akses petani terhadap permodalan, system perbenihan dan perbibitan, kelembagaan petani dan penyuluh, nilai tukar petani (NTP), keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Isu-isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas, mutu dan nilai tambah produk pertanian

Kondisi produktivitas komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Selain itu, sebagian besar produksi pertanian mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

2. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan

keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

3. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air

Kurangnya pembangunan bendung dan jaringan irigasi, serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan Daerah aliran Sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa, dan air hujan.

Pada sisi lain jalan usaha tani sebagai jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan masih sangat minim.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah pergudangan, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, Pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani baik untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. Alih fungsi lahan serta status kepemilikan lahan

Alih fungsi lahan saat ini di Maluku belum terasa namun potensi ke arah ini sangat besar terkait dengan penambahan jumlah penduduk maupun kebutuhan lahan untuk penggunaan lain baik dalam sektor pertanian sendiri maupun dari luar sektor pertanian. Dalam sektor pertanian pada beberapa tempat lahan pertanian pangan baik lahan sawah maupun lahan sagu di beberapa tempat telah dialih fungsikan misalnya untuk perkebunan swasta. Sedangkan dari luar sektor pertanian seperti permukiman, pertambangan dan perkantoran. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; regulasi atau peraturan; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian .

5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani di Maluku masih memiliki keterbatasan dalam mengakses serta menggunakan permodalan dari lembaga keuangan formal akibat tidak rela terbebani dengan persoalan kredit, tidak mau direpotkan dengan segala prosedur yang dihadapi dan atau tidak memiliki agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan.

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani, penyuluh dan petugas fungsional lapangan

Kondisi organisasi petani saat ini sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan. Pada sisi lain perlu pula peningkatan peran penyuluh dan petugas fungsional lapangan seperti petugas pengamat OPT sehingga informasi dan penanganan secara dini dapat dilakukan.

8. Belum optimalnya kinerja aparat pertanian serta belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian

Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang memuaskan. Diperlukan pembenahan internal agar aparat mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif. Pembenahan mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan wawasan serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang profesional, hingga upaya penataan kelembagaan agar mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berubah. Pembangunan sektor pertanian tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor perlu lebih sering dilakukan.

9. Jumlah tenaga kerja bidang pertanian dan Perbaiki citra petani / pertanian agar kembali diminati generasi penerus

Kondisi pertanian di pedesaan saat ini menjadi kurang menarik bagi generasi muda untuk bekerja dan berusaha di sektor pertanian terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena belum berkembangnya agroindustri di pedesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi on-farm dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Pada jangka panjang kondisi ini akan berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja di bidang pertanian.

Tantangan ke depan adalah bagaimana memantapkan pengembangan agroindustri di pedesaan. Di samping itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi pertanian (alsin tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.

10. Daya saing produk pertanian

Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk- produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah) maupun kerjasama regional (antar negara).

BAB IV

TUJUAN DAN

SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Pertanian Provinsi Maluku

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka misi Gubernur dan wakil gubernur terpilih yang cocok adalah Misi ketiga yaitu : Pengelolaan sumberdaya Alam yang berkelanjutan . Penetapan Tujuan dan sasaran pada misi tersebut, selanjutnya akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan pertanian. Tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Provinsi Maluku

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2018	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Mendorong peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian	Meningkatnya Produksi Komoditas pertanian sumber pangan dan komoditas unggulan	Produksi komoditas Pertanian									
		Daging	Ton	2,921	3,067	3,220	3,381	3,550	3,728	3,914	
		Telur	Ton	4,010	4,130	4,254	4,382	4,513	4,649	4,788	
		Padi	Ton	140,141	147,148	154,505	162,229	170,340	178,857	187,800	
		Jagung	Ton	53,863	56,556	59,384	62,353	65,471	68,745	72,182	
		Kedelai	Ton	451	474	498	523	549	576	605	
		Pala	Ton	5,135	5,237	5,342	5,449	5,558	5,669	5,782	
		Cengkeh	Ton	21,182	21,606	22,038	22,479	22,928	23,387	23,855	
		Kelapa	Ton	100,328	102,335	104,381	106,469	108,598	110,770	112,986	
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya saing Komoditas pertanian	Meningkatnya penerapan sistem jaminan mutu pada kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang menerapkan jaminan mutu	Kelompok	1	3	3	5	5	5	5	
		Volume Ekspor	Ton	0	0	50	100	100	200	200	
		Meningkatnya Kesejahteraan ekonomi Petani	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	10.21	10.26	10.32	10.38	10.43	10.49	10.54
		Nilai tukar petani	%	101,06	101,5	101,7	102	102,3	102,5	102,7	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2018	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan sumberdaya manusia pertanian	Meningkatnya jumlah Sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	28.7	36.1	44.6	52.7	65.8	76.1	87.8

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan pertanian pada periode 2019-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan yang lebih produktif dan berdaya saing, sehingga lebih sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi, produktivitas tinggi dan ramah lingkungan.

Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif, efisiensi dan daya saing. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat perdesaan.

Dengan memperhatikan Strategi yang tertuang dalam RPJMD Teknokratik 2019-2024, sektor pertanian termasuk kedalam fokus pembangunan ekonomi. Strategi Dinas Pertanian dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah dan nasional guna pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Fokus peningkatan ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian
2. Fokus penguatan sumber daya dan sarana prasarana pertanian
3. Fokus peningkatan kapasitas SDM

Strategi, arah kebijakan dan langkah-langkah operasional Dinas Pertanian Tahun 2019-2024 dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

Strategi Peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dilakukan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Tanaman pangan dan hortikultura merupakan penyedia pangan nabati sedangkan peternakan sebagai penyedia pangan hewani. Adapun strategi peningkatan produksi komoditas perkebunan dilakukan untuk peningkatan produksi komoditas unggulan Maluku yaitu Pala, Kelapa dan Cengkeh. Disamping itu strategi ini juga tertuju untuk mengembangkan komoditas perkebunan potensial lainnya yang selama ini telah diusahakan masyarakat dalam skala yang terbatas.

Arah Kebijakan dan Langkah operasional yang ditempuh untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian :

1.1. Kebijakan : Penggunaan Benih Unggul

Langkah operasional :

- Pengembangan kelembagaan perbenihan
- Sertifikasi benih
- Distribusi benih/bibit unggul
- Pengembangan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)

1.2. Kebijakan : Penerapan sistem budidaya yang baik

Langkah operasional :

- Pengembangan pangan strategis
- Pengembangan pangan lokal
- Pengembangan sumberdaya genetik asli daerah
- Pengembangan, rehabilitasi, peremajaan dan intensifikasi komoditas unggulan

1.3. Kebijakan : Meningkatkan desiminasi hasil inovasi dan teknologi pertanian

Langkah operasional

- Penerapan inovasi dan teknologi pertanian terpadu
- Penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi

2. Pencegahan dan penanggulangan OPT, penyakit ternak dan dampak perubahan iklim.

Kehadiran organisme pengganggu tanaman (OPT) , penyakit ternak dan perubahan iklim yang ekstrem sangat terkait erat dengan pencapaian produksi pertanian. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya OPT dan penyakit ternak selain kuantitas produksi juga berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan. Pada sisi selain Perubahan iklim ekstrem akan turut berdampak terhadap perubahan pola tanam, ketersediaan air bahkan turut mendorong timbulnya hama dan penyakit baru yang dapat mengancam tanaman dan ternak.

2.1. Kebijakan : Melaksanakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Langkah operasional :

- Pengaturan pola dan waktu tanam
- Efisiensi penggunaan air
- Penggunaan varietas yang sesuai

2.2. Kebijakan : Pengendalian Organisme pengganggu Tanaman dan Penyakit Ternak

Langkah Operasional :

- Pengembangan kelembagaan perlindungan dan kesehatan hewan
- Deteksi dan surveilliance secara dini
- Penyediaan sarana pengendalian
- Pengendalian Hama Penyakit Terpadu

- Pengawasan pestisida
- Penguatan sistem kesehatan hewan

3. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian

Sumberdaya pertanian baik sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan sangat berperan dalam menentukan produksi komoditas pertanian. Ketersediaan lahan, air dan sarana pendukung lainnya perlu dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutannya. Untuk itu prinsip pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan ramah lingkungan perlu untuk terus dikembangkan.

3.1. Kebijakan : Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan dan air

Langkah operasional :

- Pengembangan Kawasan berbasis korporasi petani
- Pengembangan lahan kering dan tadah hujan (*rainfed*)
- Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari 100 menjadi 200-300
- Cetak sawah dan optimasi lahan
- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar
- Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal
- Rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan peningkatan fungsi prasarana irigasi
- Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, parit/*longstorage*

3.2. Kebijakan : Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Langkah Operasional :

- Penyediaan dan fasilitasi alat dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

3.3. Kebijakan : Meningkatkan akses pembiayaan pembangunan pertanian

Langkah Operasional :

- Mendorong pemanfaatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
- Mengoptimalkan skim kredit usaha rakyat
- Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis

4. Pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil

Di sektor pertanian, penciptaan nilai tambah terjadi di sektor agroindustri atau sektor tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu ada sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.

4.1. Kebijakan : Pengembangan dan Penguatan unit-unit pasca panen dan pengolahan hasil

Langkah Operasional :

- Mendorong Pengembangan pengolahan hasil pertanian berbasis kawasan
- Pengembangan sarana pasca panen dan pengolahan hasil

4.2. Kebijakan : Meningkatkan penerapan system jaminan mutu produk pertanian

Langkah Operasional :

- Mendorong peningkatan sistem jaminan mutu produk unggulan sesuai dengan standar nasional

5. Pengembangan pemasaran produk pertanian

Aspek pemasaran dalam usaha tani menentukan seberapa besar manfaat yang anantinya kan diperoleh oleh para pelaku. Produksi yang tinggi tanpa diukung dengan upaya-upaya pemasaran yang tepat mengakibatkan ketidakpastian dalam usaha. Pada sisi laian aspek pemasaran akan menentuka dinamika anara supply dan demand.

5.1. Kebijakan : Peningkatan Promosi dan informasi Pasar

Langkah Operasional :

- Mendorong peningkatan informasi pasar
- Mendorong promosi komoditas unggulan

5.2. Kebijakan Mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan

Langkah Operasional :

- Meningkatkan kordinasi percepatan ekspor dari Maluku
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas ekspor

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pertanian

Tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan berdaya saing akan mempercepat proses desiminasi teknologi dan inovasi pertanian. SDM Pertanian peningkatan kesejahteraan petani dan pencapaian ketersediaan pangan.

6.1. Kebijakan : Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan sikap sumberdaya manusia pertanian

Langkah Operasional :

- Pendidikan dan pelatihan aparatur pertanian
- Pendidikan dan pelatihan non aparatur pertanian

6.2. Kebijakan : Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian

Langkah Operasional :

- Pengembangan pendidikan pertanian menengah atas

- Pengembangan petani milenial
- Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi
- Pengembangan kapasitas kelembagaan pertanian

7. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan pertanian merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pengembangan SDM pertanian karena meruakan wadah tepat untuk pelaksanaan usaha tani secara bersama dengan konsep saling menguntungkan. Selain sebagai wadah untuk usaha, kelembagaan pertanian dapat juga digunakan dalam rangka penyuluhan dan pelatihan di bidang pertanian.

7.1. Kebijakan : Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Langkah operasional :

- Peningkatan Sarana penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- Pengembangan SDM penyuluhan

7.2. Kebijakan : Penguatan kelembagaan petani

Langkah operasional :

- Mendorong pelaksanaan usaha tani terpadu berbasis kelompok
- Pengembangan kegiatan usaha berorientasi pasar

VISI : Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan			
Misi 3 : Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mendorong peningkatan ketersediaan Pangan Hasil Pertanian	2. Meningkatnya Produksi Komoditas sumber pangan dan unggulan bernilai ekonomi	1) Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman pangan , Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan 2) pencegahan dan penanggulangan OPT, Penyakit Ternak dan dampak perubahan iklim	1) Penggunaan Benih Unggul 2) Penerapan system budidaya yang baik 3) Meningkatkan desiminasi hasil inovasi dan teknologi pertanian 4) Melaksanakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim 5) Pengendalian Organisme pengganggu Tanaman dan Penyakit Ternak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian	1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan dan air 2) Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian 3) Meningkatkan akses pembiayaan pembangunan pertanian
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya saing Komoditas pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1) Pengembangan pasca panen, pengolahan hasil 2) Pengembangan pemasaran produk pertanian	1) Pengembangan dan Penguatan unit-unit pasca panen dan pengolahan hasil 2) Peningkatan Promosi dan informasi Pasar 3) Mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan 4) Meningkatkan penerapan system janiman mutu produk pertanian
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sumberdaya manusia pertanian	Meningkatnya jumlah Sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas	1) Peningkatan kuantitas dan Kualitas Sumberdaya manusia pertanian 2) Pengembangan kapasitas kelembagaan pertanian	1) Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan sikap sumberdaya manusia pertanian 2) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian 3) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi 4) Peningkatan pelatihan 5) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi 6) Penguatan kelembagaan petani

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4. Meningkatkan kinerja Dinas	1. Terciptanya Sinergitas perencanaan pusat dan daerah 2. Terkelolanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	1. Peningkatan konsistensi perencanaan dan implemementasi kebijakan pembangunan pertanian Nasional dan Daerah	1. Pengelolaan administrasi Perkantoran 2. Pengembangan perencanaan , evaluasi kinerja dan Pelaporan 3. Pengembangan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Dinas

BAB VI

PROGRAM . KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Rencana Program Dinas Pertanian Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, yaitu sesuai dengan Misi 3: Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Dalam mencapai misi tersebut Rencana Program dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikutura
3. Program Pengembangan Benih/Bibit Tanaman dan Ternak
4. Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Penyakit Ternak
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
6. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
7. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
8. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
9. Program Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Pertanian
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6.2. Rencana Kegiatan

1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Kegiatannya adalah :
 - Pembinaan dan Pengembangan Ubi Kayu
 - Pembinaan dan Pengembangan Jagung
 - Pembinaan dan Pengembangan Padi sawah
2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikutura
Kegiatannya adalah :
 - Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Sayuran
 - Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Buah
3. Program Pengembangan Benih/Bibit Tanaman dan Ternak
 - Pembinaan dan Pemberdayaaan Benih Tanaman Pangan
 - Pembinaan dan Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura
 - Pengembangan BBI Kairatu

- Pengembangan BBI Telaga Kodok
 - Pengembangan IP2MB
 - Pembinaan dan Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan
 - Pembinaan dan Pengembangan Plasma Nutfah Sagu
 - Pembinaan dan pengembangan perbibitan ternak
 - Pengembangan Unit Perbibitan Ternak Sapi Makariki
 - Pengembangan Taman Ternak Passo
 - Pengembangan BPSB
4. Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Penyakit Ternak
- Pengendalian OPT Perkebunan
 - Pengembangan Laboratorium Ternak
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan menular strategis dan Zoonosis
 - Penjaminan Pangan asal Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
 - Pengembangan BP3M
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Mendukung Pengembangan Tanaman Pangan
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Mendukung Pengembangan Hortikultura
 - Rehabilitasi/Renovasi Infrastruktur Sarana dan Prasarana UPTD dan Unit Operasional Daerah
 - Optimasi Lahan Kering
6. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- Distribusi Bibit Ternak
 - Pembinaan dan Pengembangan Peternakan
7. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
- Rehabilitasi, pengembangan dan peremajaan Komoditas Unggulan perkebunan
 - Pengawasan dan Pembinaan Tanaman Perkebunan
 - Penataan dan pengembangan tanaman Perkebunan sumberpangan (sagu)
8. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
 - Pengembangan pasca panen dan pengolahan Hasil Hortikultura
 - Pengembangan Pemasaran Hasil Hortikultura
 - Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan
 - Pengembangan Pemasaran hasil Perkebunan
 - Pengembangan pengolahan Hasil Peternakan
 - Pengembangan Pemasaran hasil Peternakan

9. Program Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Pertanian
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanian
 - Pengembangan Balai Diklat Pertanian
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan alat tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
 - Penyediaan Data Informasi Pertanian Melalui Website Dinas
11. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capain Kinerja Program dan Kegiatan Bidang Pertanian
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Perencanaan Pembangunan Pertanian
 - Monioring dan Evaluasi Program dan Kegiatan
 - Penyusunan Data Statistik Pembangunan Pertanian

BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024, yaitu sesuai dengan Misi 3: Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2018	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani	Meningkatnya Kesejahteraan ekonomi Petani	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	10.21	10.26	10.32	10.38	10.43	10.49	10.54
		Nilai tukar petani	%	101,06	101,5	101,7	102	102,3	102,5	102,7
2. Mendorong peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian	1. Meningkatkan Produksi Komoditas pertanian sumber pangan dan komoditas unggulan	Produksi komoditas Pertanian								
		Daging	Ton	2,921	3,067	3,220	3,381	3,550	3,728	3,914
		Telur	Ton	4,010	4,130	4,254	4,382	4,513	4,649	4,788
		Padi	Ton	114,533	120,260	126,272	132,586	139,215	146,177	153,485
		Jagung	Ton	53,863	56,556	59,384	62,353	65,471	68,745	72,182
		Kedelai	Ton	451	474	498	523	549	576	605
		Pala	Ton	5,135	5,237	5,342	5,449	5,558	5,669	5,782
		Cengkeh	Ton	21,182	21,606	22,038	22,479	22,928	23,387	23,855
		Kelapa	Ton	100,328	102,335	104,381	106,469	108,598	110,770	112,986
		2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya saing Komoditas pertanian	Meningkatnya penerapan sistem jaminan mutu pada kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang menerapkan jaminan mutu	Kelompok	1	3	3	5	5
		Volume Ekspor	Ton	0	0	50	100	100	200	200

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2018	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan sumberdaya manusia pertanian	Meningkatnya jumlah Sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	28.7	36.1	44.6	52.7	65.8	76.1	87.8

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pertanian Provinsi Maluku 2019 – 2024 ini merupakan salah satu penjabaran Program Indikatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2019. Dalam operasionalnya, Renstra SKPD ini merupakan sasaran kerja yang hendak dicapai sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan pertanian, tergantung dari peran aktif, sikap mental, tekad, semangat dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dari semua pihak baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat luas serta dunia usaha. Di samping itu perlu ditunjang oleh para pemangku kepentingan dalam bekerja sama, bersinergis untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang ditemui, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan memenuhi harapan yang diinginkan.

Pengaturan kinerja untuk mengetahui sampai seberapa jauh tingkat pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator yang dirumuskan pada setiap kegiatan dalam Rencana Strategis ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku selaku Pengarah dan Pengendali Program/Kegiatan lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

